

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA

TRIWULAN III TAHUN 2021





BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2021

SAMBUTAN KEPALA BPOM RI

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmad dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan obat dan makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2021 dituangkan dalam “**Kinerja BPOM Dalam Angka**”. Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Hingga tahun 2021 pandemi COVID 19 masih melanda dunia. Hal tersebut benar - benar mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan dan kebiasaan kita. Tidak terkecuali juga dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, beberapa kinerja yang telah dicapai Badan POM diantaranya adalah penerbitan 130.438 NIE, pemeriksaan di 19.903 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 54.114 sampel, 203 perkara, dan 29 kegiatan pelaksanaan KIE.

Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2021. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 6 Desember 2021
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Penny K. Lukito, MCP



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA BPOM R.I	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
HIGHLIGHT	1
HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	4
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Produk Obat dan Makanan	5
II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	10
III. Standardisasi	10
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan	12
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	12
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	15
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik	21
VIII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	22
IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum).....	24
X. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	25
XI. Kerjasama Internasional	27
XII. Sumber Daya Manusia	28
XIII. Pengadaan Barang Jasa	31
XIV. Pengelolaan Anggaran	31
XV. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	32
PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan	5
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	5
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	6
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.....	6
Gambar 5.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	7
Gambar 6.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	7
Gambar 7.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan.....	8
Gambar 8.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan	8
Gambar 9.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan.....	9
Gambar 10.	Profil Profil Laporan Efek Samping	9
Gambar 11.	Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Triwulan III Tahun 2021	10
Gambar 12.	Grafik Baku Metode Analisis yang dikembangkan Triwulan III Tahun 2021	13
Gambar 13.	Grafik Baku Pembanding yang dikembangkan Triwulan III Tahun 2021	13
Gambar 14.	Grafik Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu	13
Gambar 15.	Grafik Peralatan Laboratorium yang Sudah Terkalibrasi Sesuai Standar.....	14
Gambar 16.	Grafik Pengujian Spesimen Covid 19	14
Gambar 17.	Grafik Penerbitan Siaran Pers.....	15
Gambar 18.	Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media	15
Gambar 19.	Grafik Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM	16
Gambar 20.	Profil Engagement Media Sosial Badan POM	16
Gambar 21.	Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan III Tahun 2021	17
Gambar 22.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media.....	15
Gambar 23.	Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Profesi.....	18
Gambar 24.	Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Layanan Informasi dan Pengadua.....	18
Gambar 25.	Profil Layanan Informasi yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi.....	19
Gambar 26.	Profil Media Komunikasi yang Digunakan Badan POM untuk Memberikan Layanan Informasi.....	19
Gambar 27.	Formulir Pemeriksaan dalam Rangka Intensifikasi COVID-19.....	21
Gambar 28.	Tampilan Baru Aplikasi Contact Center.....	21
Gambar 29.	Grafik Sebaran Jabatan Fungsional BPOM.....	29
Gambar 30.	Grafik Akses dan data informasi yang ada pada Aplikasi SIMPONI.....	30



BADAN POM

HIGHLIGHT

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2021

Ivermectin Termasuk Obat Keras, Badan POM Ingatkan Masyarakat untuk Membeli Berdasarkan Resep Dokter

Jakarta / Jumat (02/07/2021)



“Pembelian Ivermectin yang tergolong obat keras di sarana pelayanan kefarmasian harus berdasarkan resep dokter,” tegas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam konferensi pers daring “Penggunaan dan Pengawasan Peredaran Ivermectin”. Konferensi pers ini turut dihadiri Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dr. Ari F. Syam; Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada, Zullies Ikawati; dan Epidemiolog Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Ivermectin yang terdaftar sebagai obat untuk indikasi infeksi kecacingan ini sedang banyak diberitakan dapat digunakan sebagai obat COVID-19. “Untuk itu, Badan POM perlu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar bijak dan berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan yang digunakan dalam mengobati COVID-19,” ucap Kepala Badan POM.

Kepala Badan POM Raih Penghargaan Tokoh Publik Berpengaruh dari MAW Talks Awards 2021

Di awal paruh kedua tahun 2021, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito kembali menorehkan prestasi. Kali ini Kepala Badan POM meraih penghargaan dari MAW Talk Awards (MTA) 2021 untuk kategori “Tokoh Publik Berpengaruh”. Penghargaan ini disampaikan melalui penganugerahan MTA 2021 yang disiarkan secara *online* melalui tayangan di kanal Youtube MAW Talk.

MTA 2021 adalah sebuah acara puncak tahunan dari kegiatan MAW Talk selama setahun berjalan. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para tokoh dan lembaga di bidang *Public Relations* (PR), media, dan kepemimpinan, yang memiliki pengaruh kuat, inovatif, dan kinerjanya berdampak luas sepanjang tahun 2021.

Jakarta / Jumat (09/07/2021)



Perkuat Pengawasan Obat dan Obat Tradisional, Badan POM Jalin Kerja Sama Terkait Regulasi Produk Medis dengan Jepang

Jakarta / Jumat (27/08/2021)

Komitmen Badan POM dalam pengawasan obat semakin dibuktikan dengan kerja sama penguatan kapasitas dengan berbagai negara. Salah satunya dengan Jepang melalui penandatanganan Memorandum Kerja Sama (MKS) tentang Kerangka Dialog dan Kerja Sama Regulasi Produk Medis antara Badan POM dengan *Ministry of Health, Labour, and Welfare*/MHLW. MKS ditandatangani secara *desk to desk* oleh Direktur Jenderal Biro Keamanan Farmasi dan Kesehatan Lingkungan MHLW Jepang, Kamata Mitsuaki di Tokyo dan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito.



Kepala Badan POM menyatakan dengan adanya MKS ini akan memperkuat hubungan strategis antara kedua otoritas melalui pertukaran informasi dan kerja sama pengawasan produk medis, yang meliputi produk farmasi, produk biologi, dan obat tradisional. “MKS ini juga akan menjadi *platform* untuk memperkuat kolaborasi ilmiah yang selama ini telah dilakukan, baik secara bilateral maupun dalam forum regional,” jelas Kepala Badan POM.

Sosialisasi Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan (SK): Pahami dan Laporkan Bila Terjadi

Badan POM menggelar “Sosialisasi Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (OT) dan Suplemen Kesehatan (SK) yang diselenggarakan secara *online* diikuti oleh peserta yang berasal dari tim ahli Dinas Kesehatan, Asosiasi Profesi, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat. Selain itu juga hadir narasumber yang kompeten dari Badan POM, serta pakar farmakologi dari Universitas Indonesia, dr. Purwanti Astuti Ascobat dan dokter sekaligus *public figure*, dr. Vito Damay. Melalui acara ini, Badan POM berharap agar materi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan OT dan SK. Di samping untuk meluruskan pemahaman yang selama ini ada di masyarakat bahwa konsumsi obat berbahan alam aman dan tidak menyebabkan efek samping. Kegiatan ini sekaligus juga meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat umum dan tenaga kesehatan serta kefarmasian dalam memanfaatkan saluran pelaporan dari Badan POM apabila terjadi efek samping akibat dari penggunaan OT dan SK.

Jakarta / Senin (09/08/2021)



Badan POM Cetak Rekor MURI Melalui Karya 1.095 Film Pendek KIE Obat dan Makanan

Bandung / Jumat (03/09/2021)



Badan POM mencetak rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk Pembuatan Film yang dihasilkan melalui penyelenggaraan Lomba Film Pendek tentang Keamanan Obat dan Makanan. Rekor tersebut secara resmi diberikan oleh pihak MURI kepada Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito pada acara Penganugerahan Rekor MURI Gebyar Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) 1.095 Film Pendek Obat dan Makanan.

“Ini merupakan bentuk inovasi KIE yang menjadi salah satu tugas dan fungsi Badan POM dalam melayani dan melindungi masyarakat. Pencapaian Rekor MURI ini tentunya sangat membanggakan. Semoga dapat menjadi inspirasi bagi para kaum muda khususnya untuk menghasilkan bentuk edukasi masyarakat dengan memanfaatkan pengembangan teknologi,” jabar Kepala Badan POM.

Tembus Pasar Global, Badan POM Apresiasi Pelepasan Ekspor Produk PT. AMA ke Tiongkok

Badan POM resmikan pelepasan ekspor perdana produk suplemen kesehatan PRO EM-1 yang diproduksi oleh PT Agro Mitra Alimentare (PT. AMA) secara virtual. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengapresiasi langkah PT. AMA yang telah berhasil menembus pasar global dan ekspor perdana ke negara Tiongkok di tengah persaingan ketat pada masa pandemi ini. “Salah satu kunci perbaikan ekonomi adalah peningkatan kinerja ekspor nasional. Oleh karena itu, upaya ekspor produk probiotik dari PT AMA ini tentunya perlu untuk mendapat apresiasi, mengingat persaingan di pasar dunia juga semakin ketat saat ini,” ungkap Penny K. Lukito.

PT AMA yang berlokasi di Kabupaten Malang – Jawa Timur merupakan salah satu produsen suplemen kesehatan probiotik yang mendapatkan pendampingan dari Badan POM. Komitmen PT AMA dalam membangun fasilitas produk suplemen kesehatan sesuai standar internasional serta memproduksi dengan cara pembuatan yang baik dengan didukung inovasi yang sesuai dengan ketentuan dan pendampingan Badan POM, membuat industri ini mampu menembus pasar global.

Jakarta / Kamis (09/09/2021)





BADAN POM

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

s.d. TRIWULAN III TAHUN 2021

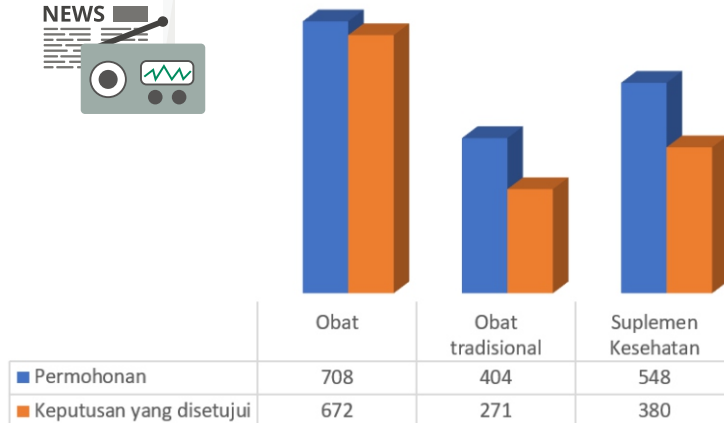
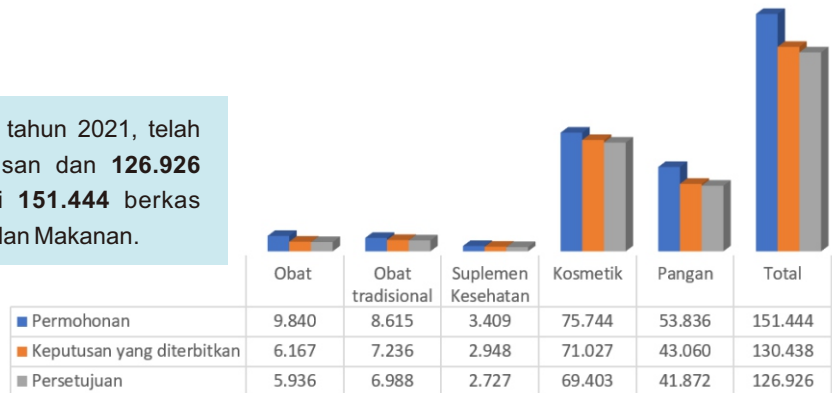
I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat dan Mutu Obat dan Makanan

Pengawasan *pre-market*

Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Republik Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh BPOM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.



Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, telah diterbitkan **130.438** keputusan dan **126.926** persetujuan izin edar dari **151.444** berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.



Gambar 2. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/ Dipublikasikan

Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, BPOM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari 1.660 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.323 (79,70%) iklan.**

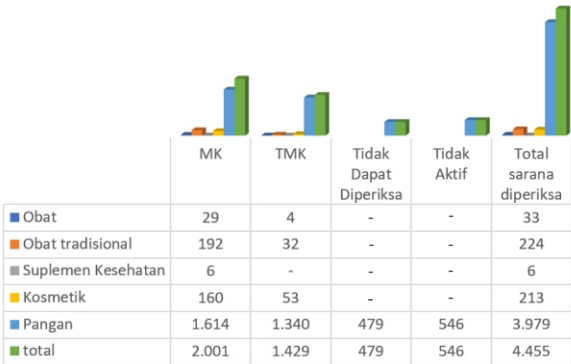
Pengawasan *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

1

Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi

B POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

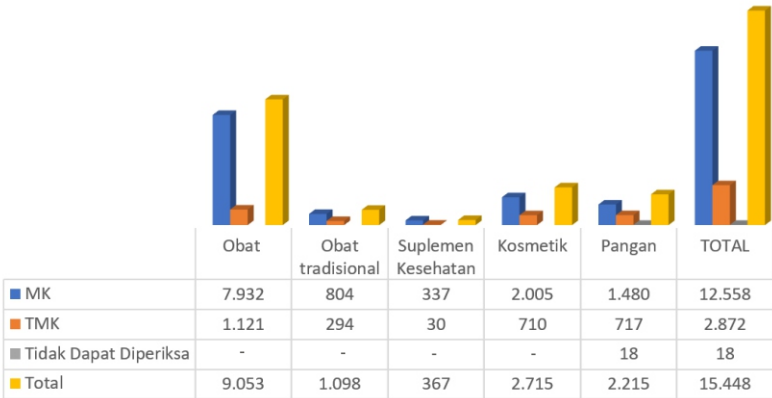


Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah diperiksa sebanyak **4.455 sarana produksi** Obat dan Makanan dengan **1.429 (32,08%) sarana** adalah **TMK**.

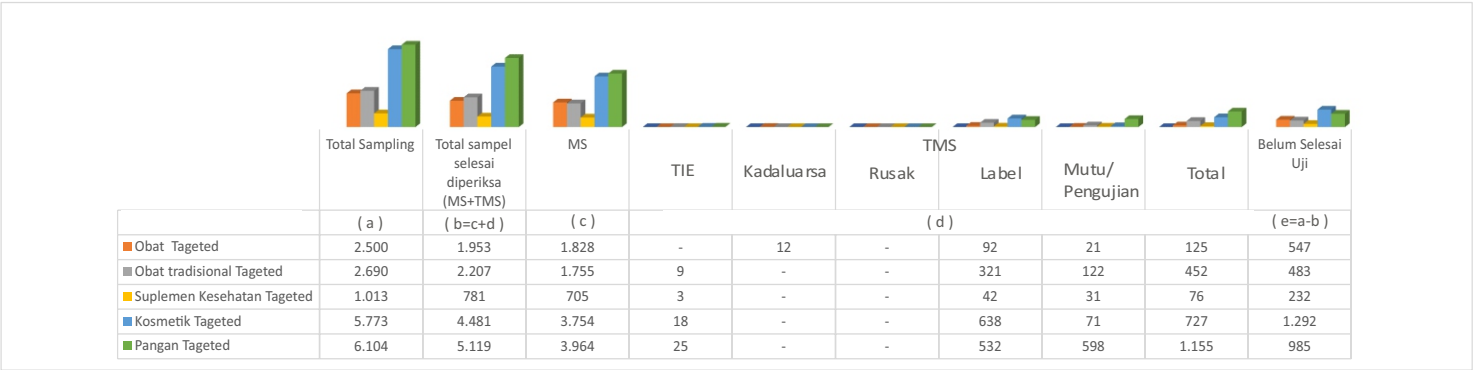
Keterangan:
MK = Memenuhi Ketentuan
TMK = Tidak Memenuhi

Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah diperiksa **15.448 sarana distribusi** Obat dan Makanan dengan **2.872 (18,59%) sarana** adalah **TMK**.



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

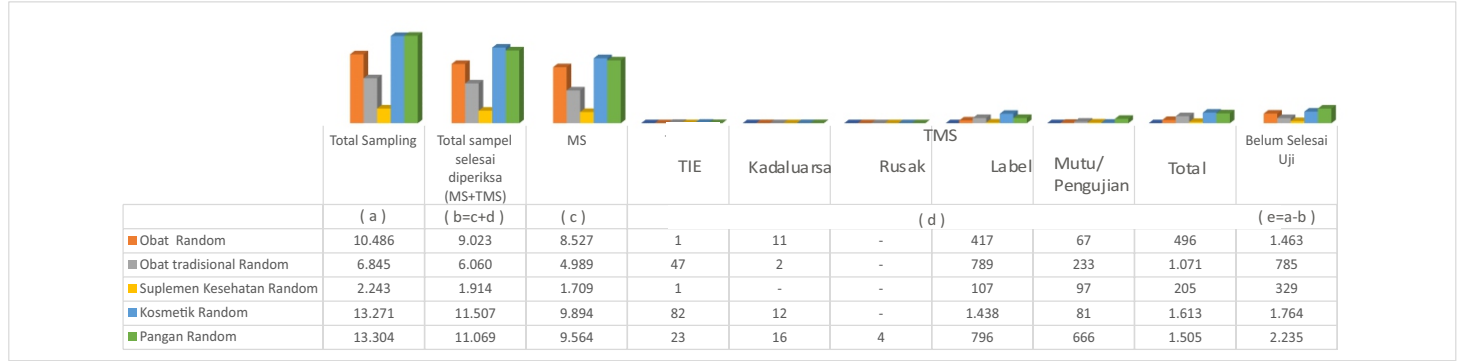
A. Targeted



Gambar 5. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)

Sampai dengan **Triwulan III tahun 2021**, dari **18.080 sampel targeted** yang disampling terdapat **14.541** sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **2.535 (17,43%)** sampel tidak memenuhi syarat.

B. Random / Acak



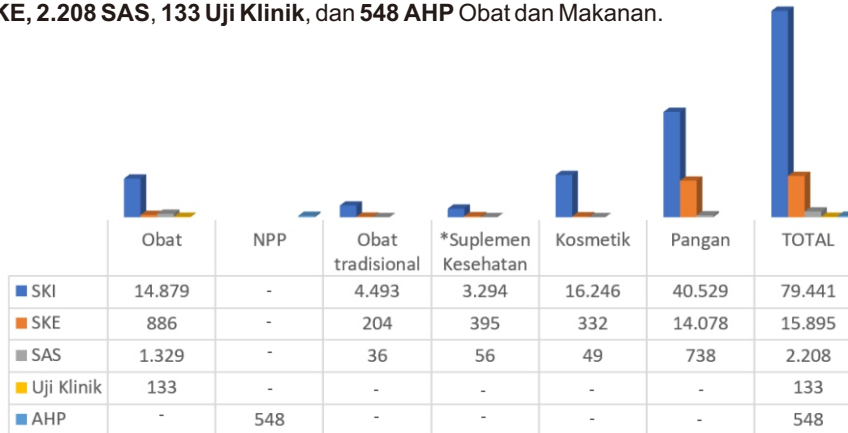
Gambar 6. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)

Sampai dengan **Triwulan III tahun 2021**, dari **46.149 sampel random** yang disampling terdapat **39.573** sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana **4.890 (12,36%)** sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
MS = Memenuhi Syarat
TMS = Tidak Memenuhi Syarat
TIE = Tanpa izin Edar

* Sumber data Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)

Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan Produk dan Bahan Baku yang masuk ke wilayah Indonesia, BPOM mengeluarkan Surat Keterangan impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan **Triwulan III tahun 2021** telah diterbitkan **79.441 SKI**, **15.895 SKE**, **2.208 SAS**, **133 Uji Klinik**, dan **548 AHP** Obat dan Makanan.



* Termasuk Kuasi

Gambar 7. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan

Pengawasan iklan

4



Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, BPOM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet*/brosur. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari 79.243 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 9.741 (12,29%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

Gambar 8. Profil Pengawasan iklan Obat dan Makanan



BPOM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui BPOM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. **Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari 51.176 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 5.048 atau sekitar 9,86% label tidak memenuhi ketentuan.**

* Termasuk Kuasi

5

Pengawasan Label



	Obat	Obat tradisional	*Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Rokok
■ MK	21.408	7.078	2.569	9.741	2.099	3.233
■ TMK	76	1.355	189	2.160	566	702

Gambar 9. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

6

Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, BPOM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia

- ~ MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmakologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya
- ~ MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.



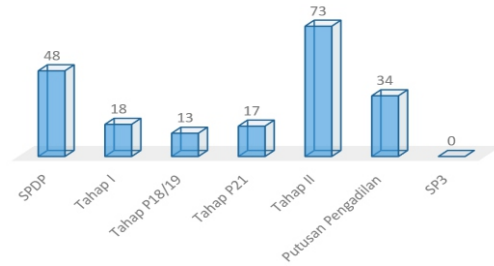
	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjuti	%
Obat	6.967	5.101	73,22
Obat Tradisional	55	55	100,00
Suplemen Kesehatan	39	39	100,00
Kosmetik	466	361	77,47

Gambar 10. Profil Laporan Efek Samping

II. Hasil Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras di sarana yang tidak berwenang, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 203 perkara dengan jumlah nilai barang bukti sebesar Rp44,018,767,256,-. Sebanyak 48 perkara masih dalam tahap SPDP, 18 perkara pada tahap I, 13 perkara pada tahap P18/19, 17 perkara pada tahap P21, 73 perkara sudah penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU (Tahap II), 34 perkara telah sampai pada putusan pengadilan, dan 0 perkara pada tahap pemberhentian penyidikan (SP3).



Gambar 11. Grafik Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan Seluruh Indonesia Triwulan III Tahun 2021

III. Standardisasi

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.



Obat

Adanya refocusing anggaran, menyebabkan penurunan target output yang semula adalah 12 (dua belas) peraturan/standar/pedoman obat, saat ini menjadi 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 10 (sepuluh) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Yang Baik untuk Laboratorium Pengolahan Sel, Sel Punca dan Jaringan (42,86%).
2. Keputusan Kepala Badan POM tentang Petunjuk Teknis Prinsip Penggunaan Obat Melalui Skema Perluasan Penggunaan Khusus (Expanded Access Program) Pada Kondisi Darurat (100%).
3. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pelaporan Kegiatan Distribusi Obat dan Bahan Obat (100%).
4. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Pengawasan Peredaran Obat dalam Rangka Bukan Perdagangan (85,71%).
5. Rancangan Perubahan Ketiga Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (100%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Tata Laksana Uji Bioekivalensi (100%).
7. Rancangan Keputusan Kepala Badan POM tentang Penetapan Informatorium Obat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia Edisi 3 (100%).
8. Standar Obat Non Kompendial (100%).
9. Standar Mutu Produk Radiofarmaka (100%).
10. Peraturan Badan POM tentang Metode Analisis, Standar dan/atau Persyaratan Obat dan Bahan Obat dalam Rangka Pengawasan Obat dan Bahan Obat (57,14%).



Obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan

Terdapat 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang sedang dalam proses penyusunan. Berikut 7 (tujuh) peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III:

1. Rancangan Peraturan tentang Pedoman Teknis Pengawasan Tanaman Obat Tradisional Tertentu sebagai Obat Tradisional Untuk Keperluan Khusus (60%).
2. Revisi Peraturan Badan POM Nomor 32 tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional (60%).
3. Peraturan Badan POM tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan (Revisi Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Suplemen Kesehatan) (80%).
4. Peraturan Badan POM tentang Pengawasan dan Registrasi Obat Kuasi (80%).
5. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (80%).
6. Rancangan Peraturan Badan POM tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (80%).
7. Surat Keputusan Badan POM tentang Penetapan dan Pengawasan Vitamin D di atas 1000-4000 IU sebagai Suplemen Kesehatan untuk Keperluan Khusus pada Pandemi Covid-19 (90%).

Target jumlah kajian obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) kajian, yang terdiri dari 60 (enam puluh) kajian di bidang Obat Tradisional, 55 (lima puluh lima) kajian di bidang suplemen kesehatan dan 15 (lima belas) kajian di bidang Kosmetik. Sampai dengan Triwulan III ini telah diselesaikan sebanyak 134 kajian yang terdiri dari 57 (lima puluh tujuh) kajian di bidang Obat Tradisional, 59 (lima puluh sembilan) kajian di bidang Suplemen Kesehatan dan 17 (tujuh belas) kajian di bidang Kosmetik. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan *stakeholder*. Topik kajian dapat berupa bahan baku baru, jenis sediaan baru ataupun teknologi pembuatan produk yang baru.



Pangan

Terdapat 9 (sembilan) peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 9 (sembilan) peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. *Review* Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan: Lampiran I-III (50%).
2. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan (78%).
3. Rancangan Revisi Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bahan Tambahan Pangan Campuran (100%).
4. Revisi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan (terkait Probiotik) (78%).
5. Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang Pencantuman ING untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Kecil (90%).
6. Pedoman Implementasi Regulasi Makanan Pendamping - Air Susu Ibu (MPASI) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (90%).
7. Amandemen Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (100%).

8. Pedoman Implementasi Kategori Pangan 16.0 (Pangan Siap Saji Terkemas) (70%).
9. Naskah Kebijakan (*Policy Paper*) Sinkronisasi Regulasi dan Standar Air Minum (termasuk Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang) (60%).

Target jumlah kajian pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 adalah 200 (dua ratus) kajian. Sampai dengan triwulan III telah diselesaikan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) kajian. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

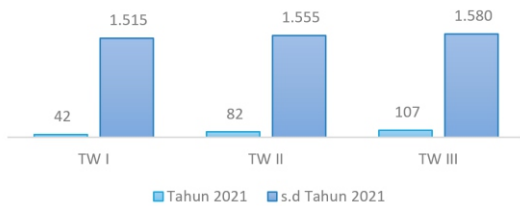
IV. Riset dan Kajian di Bidang Obat dan Makanan

Riset dan Kajian Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 7 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan BPOM pada tahun 2021 dengan progres triwulan III sebagai berikut:

1. Kajian dalam rangka Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan POM (77%).
2. Desain dan Metodologi Survei Data Dasar Pengawasan Obat dan Makanan (76%).
3. Kajian Pengendalian Resistensi Antimikrobia (82%).
4. Riset dan Kajian Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan untuk Mendukung UMKM (78%).
5. Kajian Keamanan Pangan INARAC: Cemaran Mikroplastik dan *Emerging Issue* pada Air Minum dan Air Produksi Obat dan Makanan (77%).
6. Kajian Keamanan Pangan INARAC : Cemaran Arsen Inorganik dalam Produk Beras dan Produk Ikan (85%).
7. Kajian Evaluasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pengawasan Obat Dan Makanan (DAK POM) (66%).

V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

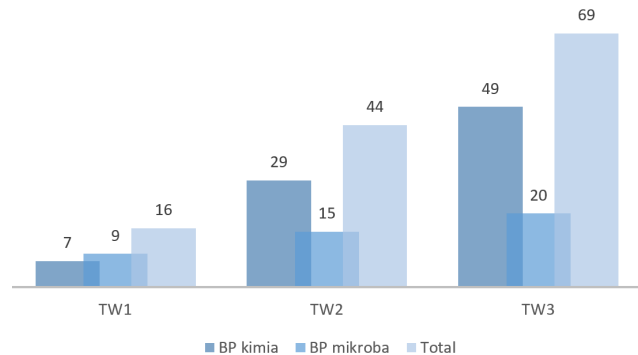
1. **Peningkatan Kapasitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)**
GLP (*Good Laboratory Practice*) yang dimaksud adalah Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tahun 2020-2024 yang meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi, dan Standar peralatan. Laboratorium Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) yang memenuhi standar kemampuan laboratorium adalah laboratorium BB/BPOM yang mencapai nilai sama dengan atau lebih dari Cut off (>70%). Pemenuhan SKL diperoleh dari hasil asesmen laboratorium BB/BPOM menggunakan SKL Balai POM Tahun 2020-2024. Pengukuran Capaian Indikator nilai persentase pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM dilakukan pada akhir tahun. Progres kegiatan di triwulan III ini adalah pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengujian ke Balai Besar/Balai POM, Pengembangan Kemampuan Laboratorium untuk Balai Besar/Balai POM, pelaksanaan uji profisiensi/kolaborasi dalam rangka peningkatan pemenuhan SKL sebagai upaya intervensi yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian target SKL Balai Besar/Balai POM. Dari monitoring dan evaluasi Roadmap SKL pada triwulan III dari 33 BB/BPOM ini didapatkan pemenuhan 25 Balai POM dengan capaian SKL di atas 70%.
2. **Metode Analisis (MA) yang dikembangkan**
PPPOMN terus mengembangkan metode analisis (MA) obat dan makanan agar laboratorium BPOM dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar. Pengembangan Metode Analisis (MA) dilakukan untuk komoditi obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan air, produk biologi, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan.



Gambar 12. Grafik Metode Analisis yang Dikembangkan Triwulan III Tahun 2021

3. Baku Pembanding yang dikembangkan

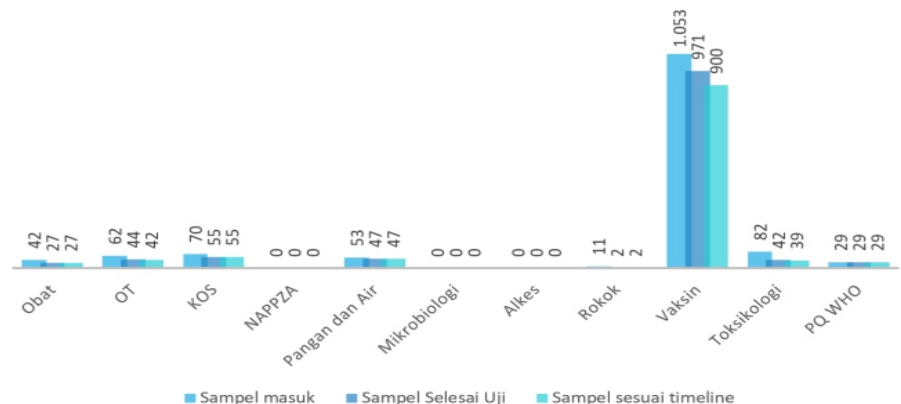
Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah dikembangkan baku pembanding sebanyak 69, yaitu 49 BP kimia dan 20 BP mikroba.



Gambar 13. Grafik Baku Pembanding yang dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2021

4. Sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu

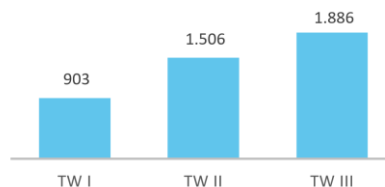
PPPOMN selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian obat dan makanan termasuk sampel Pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat, yaitu dengan pemenuhan *timeline* pengujian sampel obat dan makanan. Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu dengan target 92%. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, terdapat 1.141 (93,76%) sampel yang sesuai timeline dari 1.217 sampel yang selesai uji dan 1.402 sampel yang masuk.



Gambar 14. Grafik Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

5. Alat Pengujian Laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai dengan standar. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, telah dilakukan kalibrasi sebanyak 1.886 dari 3.016 alat (62,53%).



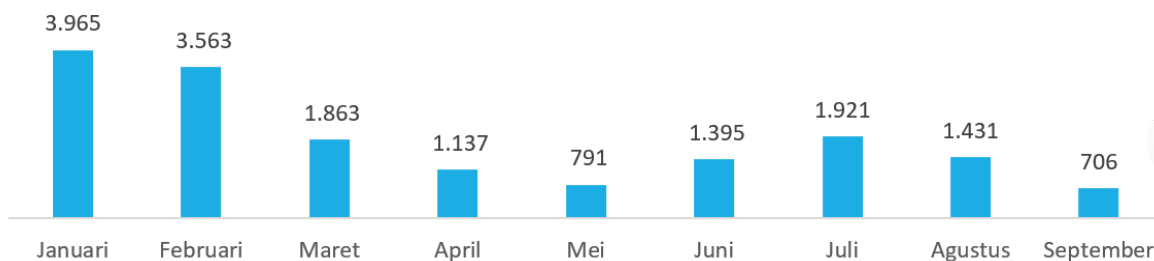
Gambar 15. Grafik Peralatan Laboratorium yang Sudah Terkalibrasi Sesuai Standar

6. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, workshop, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan BPOM dan laboratorium non-BPOM sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, telah terlaksana kegiatan 5 jejaring LRPPI pengujian Bahan Tambahan Pangan dalam Pangan Olahan, LRPPI pengujian Mikrobiologi dalam Pangan Olahan, LRPPI pengujian Mikotoksin dalam Pangan Olahan, dan Jejaring APTL.

7. Pengujian Sampel Spesimen Covid-19

Dimasa pandemi PPPOMN berkontribusi dalam pengujian sampel spesimen covid-19 yang dilakukan di Laboratorium Biohazard. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, spesimen covid-19 yang diuji di Laboratorium Biohazard sebanyak 16.722 spesimen, dimana jumlah spesimen yang diuji selama 2 bulan terakhir mengalami penurunan, begitu pula dengan tren *positively rate* yang mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir dengan penurunan di bulan september yang terjadi secara drastis.

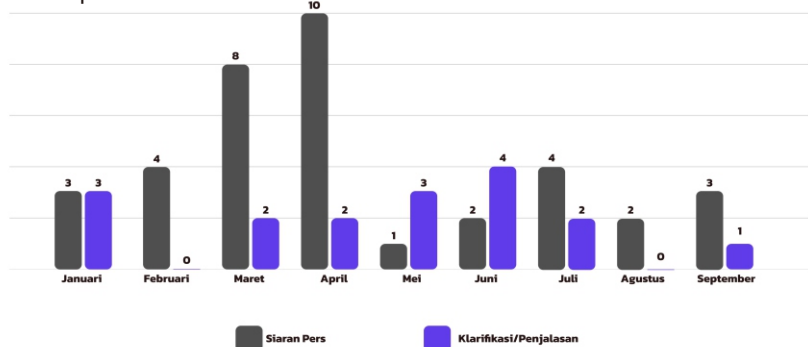


Gambar 16. Grafik Pengujian Spesimen Covid 19

VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

Hingga triwulan III tahun 2021, Badan POM telah menerbitkan 37 (tiga puluh tujuh) siaran pers dan 17 (tujuh belas) penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Selama Januari-September 2021, penerbitan siaran pers paling banyak terjadi di bulan April yaitu sebanyak 10 (sepuluh) terbitan sedangkan penjelasan/klarifikasi paling banyak diterbitkan di bulan Juni yaitu 4 (empat) penjelasan.

Pada triwulan ini, bahasan isu yang paling sering diterbitkan dalam siaran pers maupun penjelasan/klarifikasi adalah pengawasan obat termasuk vaksin dan obat COVID-19 terkait program vaksinasi di Indonesia. Seluruh siaran pers dan penjelasan/klarifikasi berita dipublikasikan melalui website dan media sosial resmi Badan POM.

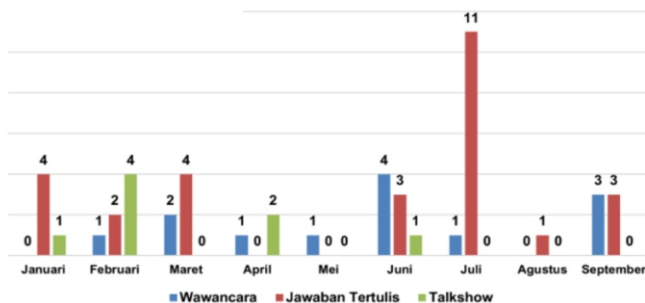


Gambar 17. Grafik Penerbitan Siaran Pers

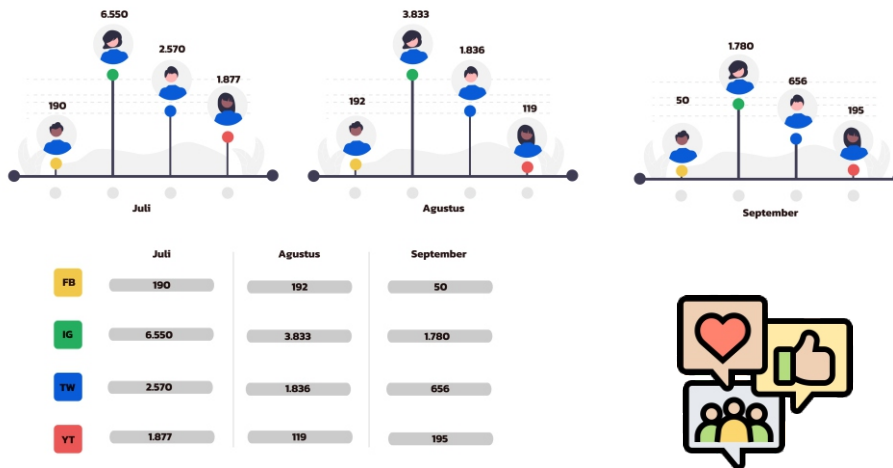
Badan POM juga aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan melalui berita aktual yang diunggah pada website resmi Badan POM dan disebarkan ke media massa. Tercatat 114 (seratus empat belas) berita aktual yang telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM dari Januari hingga September 2021. Adapun peliputan kegiatan Badan POM yang telah dilakukan sepanjang triwulan I hingga III sebanyak 253 (dua ratus lima puluh tiga) kegiatan, baik yang diselenggarakan di dalam maupun luar kota. Tidak semua peliputan kegiatan Badan POM dijadikan berita aktual, pertimbangan ini dilakukan berdasarkan penilaian strategis kegiatan.

Pada triwulan III tahun 2021, aktifitas media sosial Badan POM pada (4 platform media sosial yaitu *Facebook*, *Instagram*, *Twitter*, dan *Youtube* mencapai 1.292 unggahan, dengan rata-rata unggahan sebanyak 2-3 unggahan per hari. Platform *Twitter* merupakan platform yang memiliki aktifitas tertinggi sebanyak 817 *tweets* dibandingkan dengan 3 platform media sosial lainnya. Aktivitas ini karena adanya keterbatasan jumlah karakter dalam sekali unggahan sehingga publikasi kegiatan dilakukan dalam beberapa *tweet*. Aktivitas tertinggi kedua adalah *Instagram* dengan 269 unggahan, menyusul *Facebook* sebanyak 162 unggahan, serta *Youtube* sebanyak 18 video.

Hingga triwulan III tahun 2021, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara, jawaban tertulis, dan talkshow. Badan POM melayani 49 (empat puluh sembilan) kegiatan pelayanan informasi antara lain: 13 (tiga belas) wawancara langsung, 28 (dua puluh delapan) secara tertulis, dan 8 (delapan) talkshow.

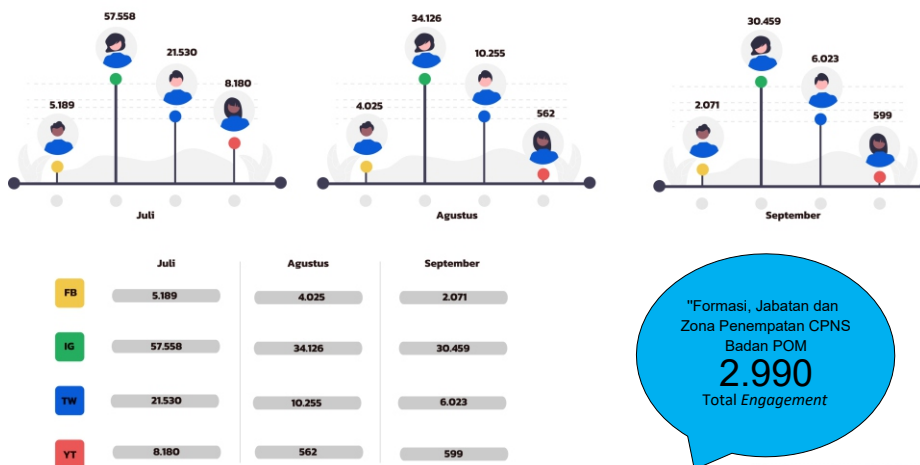


Gambar 18. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Media



Gambar 19. Grafik Pertumbuhan Audience Media Sosial Badan POM

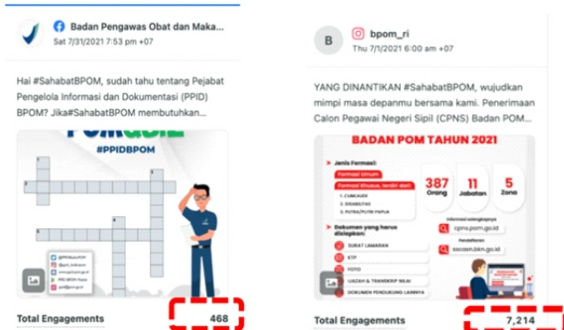
Sementara itu, pertumbuhan *audience*/khalayak/pengunjung pada triwulan III terhadap 4 *platform* media sosial terpantau fluktuatif. *Instagram* merupakan *platform* dengan total *audience* tertinggi di triwulan III ini dengan jumlah *audience* sebanyak 12.168. Sementara di peringkat kedua dan seterusnya yaitu *platform* *Twitter* dengan jumlah *audience* sebanyak 5.062, Youtube dengan jumlah *audience* sebanyak 2.191, dan Facebook dengan 432 *audience*. Pertumbuhan *audience* tertinggi terjadi pada Juli, yaitu sebesar 11.187 *audience*, disusul Agustus (5.980 *audience*) dan September (2.681 *audience*).



"Formasi, Jabatan dan Zona Penempatan CPNS Badan POM
2.990
Total Engagement

Gambar 20. Profil Engagement Media Sosial Badan POM

Pada triwulan III, *engagement* pada setiap *platform* cenderung fluktuatif. *Engagement* tertinggi terjadi pada bulan Juli, dengan jumlah 92.457, diikuti bulan Agustus sebesar 48.968, dan September sebesar 39.152. Pertumbuhan jumlah *engagement* terlihat fluktuatif di 4 *platform* tersebut. Pertumbuhan tertinggi pada Juli karena ada informasi penerimaan CPNS, penerbitan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin COVID-19, yaitu Comirnaty Pfizer dan Moderna, Kebakaran Gedung Badan POM, Penggunaan vaksin Sinovac untuk anak 12-17 tahun, dan penggunaan Ivermectin dalam kerangka Uji Klinik.



Selama triwulan III tahun 2021 terdapat 28.649 pemberitaan terkait Badan POM. Pemberitaan tersebut terdiri dari pemberitaan terkait Obat dan Makanan secara umum dan Badan POM. Dari 28.649 pemberitaan tersebut, distribusi sentiment pemberitaan mengenai Badan POM didominasi pemberitaan bertonasi netral, yaitu sebanyak 17.340 berita (60,53%), diikuti dengan pemberitaan bertonasi positif sebanyak 11.256 berita (39,29%) dan 53 berita (0,18%) bertonasi negatif.

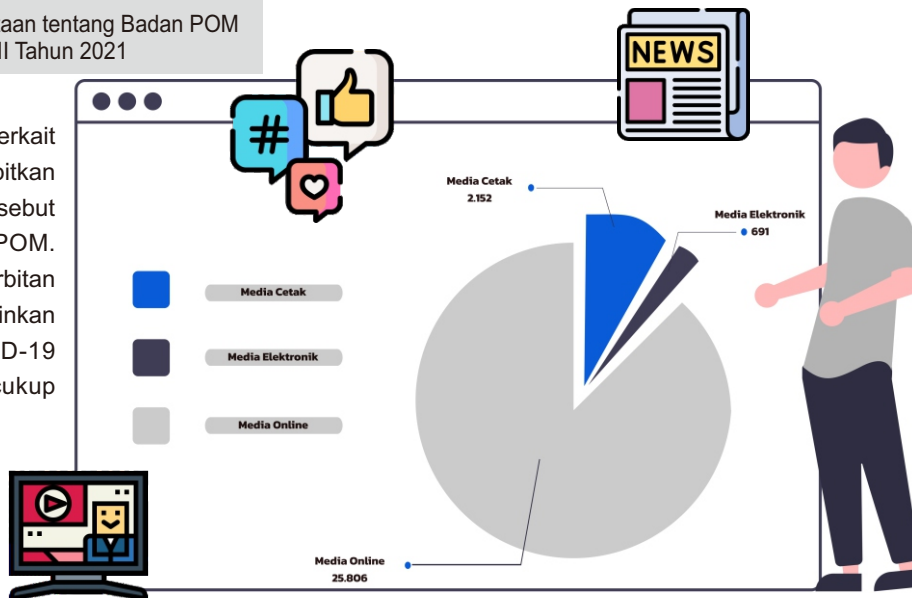


Bulan	Positif	Netral	Negatif	Total
Januari	1.887	2.203	1	4.091
Februari	1.142	1.615	1	2.758
Maret	1.240	2.678	0	3.918
April	1.255	2.819	7	4.081
Mei	947	1.751	0	2.698
Juni	1.065	1.331	26	2.422
Juli	1.566	2.678	16	4.260
Agustus	981	1.094	2	2.077
September	1.173	1.171	0	2.344

Gambar 21. Jumlah Pemberitaan tentang Badan POM selama Triwulan III Tahun 2021

Pada Januari 2021 diawali dengan pemberitaan terkait EUA vaksin COVID-19 yang pertama kali diterbitkan dan vaksinasi perdana dilaksanakan. Hal tersebut memicu jumlah pemberitaan untuk Badan POM. Sedangkan pada Februari terdapat 2 kali penerbitan EUA yaitu untuk vaksin CoronaVac yang diizinkan digunakan untuk lansia serta vaksin COVID-19 produksi Bio Farma, kedua EUA tersebut cukup banyak menarik perhatian media.

Berdasarkan jenis media, pemberitaan terkait Badan POM didominasi oleh pemberitaan melalui media online, yaitu sebanyak 25.806 berita (89,75%), selanjutnya diikuti 2.152 pemberitaan (7,48%) melalui media cetak dan 796 berita (2,77%) melalui media elektronik.



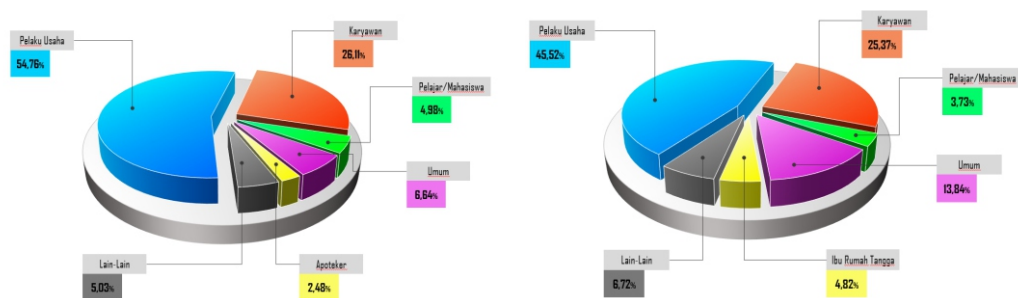
Gambar 22. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media

Pada Juli 2021, pemberitaan mengenai temuan Badan POM pada PT Harsen terkait promosi berlebihan Ivermectin dan Indofarma yang mempunyai izin edar untuk ivermectin serta EAP untuk Ivermectin. Badan POM kemudian menerbitkan keterangan resmi yang menjelaskan bahwa Ivermectin masih dalam tahap uji klinik dan melarang berbagai pihak mempromosikannya sebagai obat COVID-19. Selain itu pemberitaan juga didominasi mengenai Penerbitan EUA vaksin Moderna dan Pfizer.

Memasuki bulan Agustus 2021, pemberitaan masih terkait seputar vaksin kali ini adalah penerbitan EUA vaksin Sputnik-V asal Rusia dengan *platform* Non-Replicating Viral Vector dan pemberian CPOB pada PT Biotis untuk produksi vaksin Merah Putih bersama Unair.

Pada September 2021, pemberitaan didominasi oleh isu Susu Kental Manis (SKM) terkait pernyataan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang disebut melarang SKM dikonsumsi dengan cara diseduh. Badan POM kemudian menerbitkan keterangan resmi yang menjelaskan klarifikasi bahwa SKM tidak untuk menggantikan ASI dan tidak cocok dikonsumsi oleh bayi sampai usia 12 bulan dan SKM tidak dianjurkan sebagai hidangan tunggal berupa minuman susu. Pemberitaan juga masih terkait vaksin yaitu penerbitan EUA vaksin Janssen serta vaksin Convidecia.

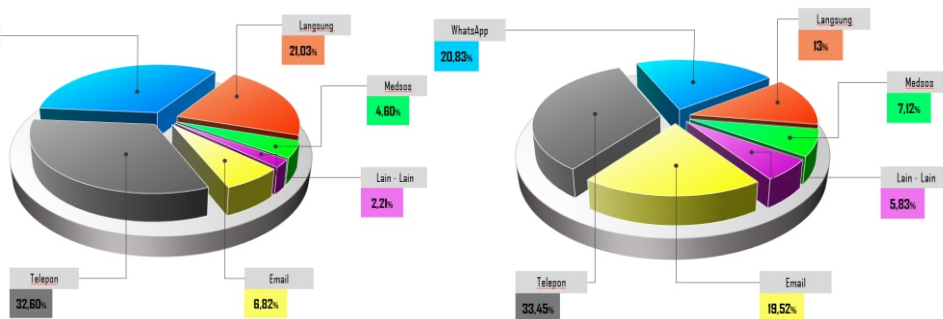
Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat periode Januari-September tahun 2021, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center* HaloBPOM 1500533 sebanyak 38.120 layanan, terdiri dari 36.646 (96,14%) layanan permintaan informasi dan 1.474 (3,87%) layanan pengaduan.



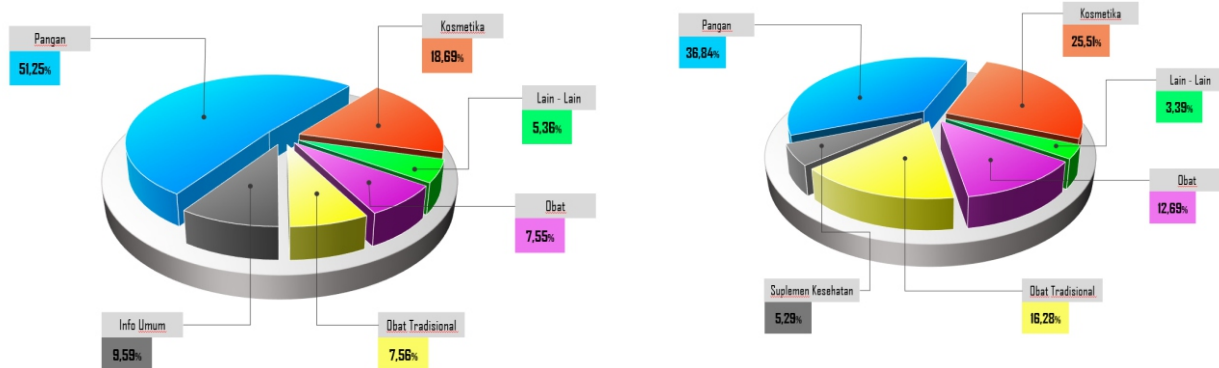
Gambar 23. Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 20.068 (52,64%) layanan dan karyawan sebanyak 9.570 (25,10%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 671 (45,52%) layanan dan karyawan sebanyak 374 (1,00%) layanan.

Media komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam mengakses layanan informasi yaitu melalui aplikasi WhatsApp sebanyak 11.994 (32,73%) layanan dan telepon sebanyak 11.948 (32,60%) layanan. Adapun media yang paling banyak digunakan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yaitu melalui telepon sebanyak 493 (33,45%) dan aplikasi WhatsApp sebanyak 307 (20,83%) layanan.

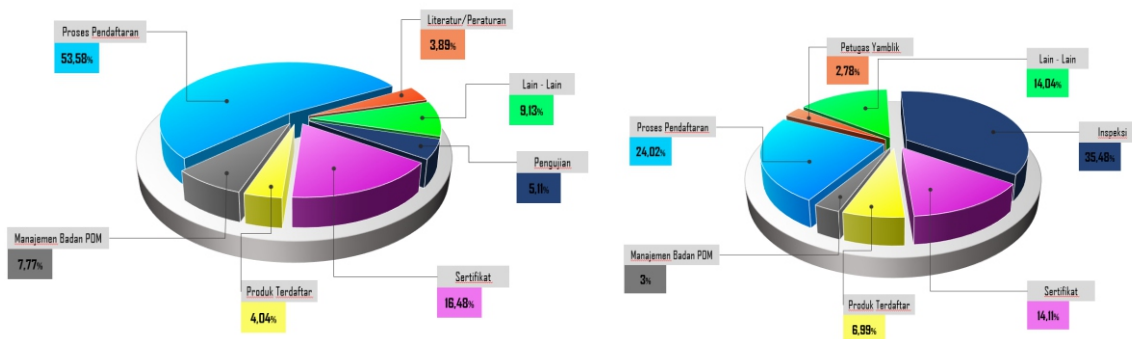


Gambar 24. Profil Pengguna Layanan Informasi Badan POM Berdasarkan Layanan Informasi dan Pengaduan



Gambar 25. Profil Layanan Informasi yang Diberikan oleh Badan POM Berdasarkan Komoditi

Komoditi yang banyak ditanyakan masyarakat yaitu terkait informasi pangan sebanyak 18.781 (51,25%) layanan dan kosmetika sebanyak 6.849 (18,69%) layanan. Adapun komoditi yang banyak diajukan juga yaitu pangan sebanyak 543 (36,84%) layanan dan kosmetika sebanyak 376 (25,51%) layanan.



Gambar 26. Profil Media Komunikasi yang Digunakan Badan POM untuk Memberikan Layanan Informasi

Topik informasi yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat yaitu informasi terkait proses pendaftaran sebanyak 19.635 (53,58%) layanan dan proses sertifikasi sebanyak 6.039 (16,48%) layanan. Topik lain yang sering ditanyakan antara lain tentang manajemen umum, seperti penerimaan CPNS BPOM, informasi magang/penelitian, informasi nomor kontak dan alamat unit di BPOM, pengujian laboratorium, produk terdaftar, peraturan terkait pengawasan Obat dan Makanan, desain kemasan, produsen/distributor, klarifikasi *Public Warning*, indikasi/khasiat, label halal, bahan tambahan pangan, tanggal kedaluwarsa, serta petugas pelayanan publik. Adapun topik pengaduan yang banyak diajukan sebagian besar yaitu tentang inspeksi sebanyak 523 (35,48%) layanan dan keluhan terkait timeline proses pendaftaran sebanyak 354 (24,02%) layanan.

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan Triwulan III Tahun 2021 *

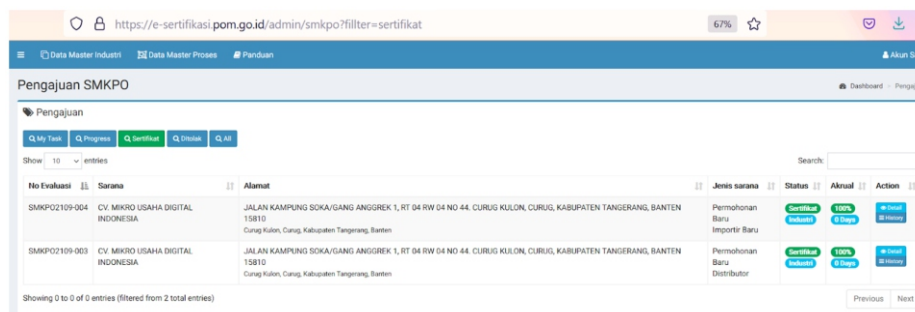
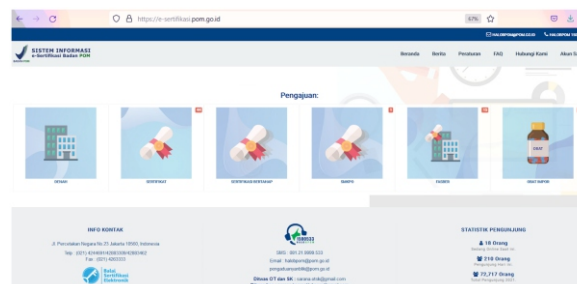


* KIE yang dilakukan Oleh Biro Hukum dan Organisasi

VII. Digitalisasi Pelayanan Publik

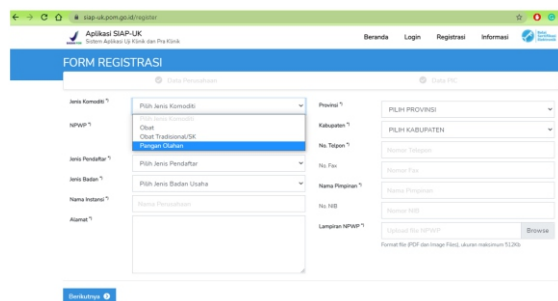
a. Pengembangan Sistem Sertifikasi

Pada triwulan III ini telah selesai dikembangkan sistem sertifikasi terkait modul Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) yaitu pengembangan terkait alur Sertifikasi Pemenuhan Komitmen dan Sertifikasi Pemenuhan Standar SMKPO. Modul SMKPO sendiri telah dilaksanakan SIT pada tanggal 27 Juli 2021 dan UAT pada tanggal 2 Agustus 2021 dan dinyatakan lulus ujicoba. Setelah dinyatakan lulus UAT, modul SMKPO dilakukan implementasi pada server *production*, sehingga dapat langsung diakses pada alamat e-sertifikasi.pom.go.id. Saat ini terhitung sudah 2 sertifikat yang terbit terkait sertifikat SMKPO, sertifikat tersebut terbit pada tanggal 1 Oktober 2021 menggunakan tanda tangan elektronik.



Gambar 27. Formulir Pemeriksaan dalam Rangka Intensifikasi COVID-19

b. Sistem Aplikasi Uji Klinik dan Pra Klinik (SIAP-UK)



Gambar 28. Tampilan Baru Aplikasi *Contact Center*

SIAP-UK merupakan sistem aplikasi yang memberikan pelayanan pengajuan Uji Pralitik komoditi Obat Tradisional, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan juga Uji Klinik komoditi Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan. Aplikasi ini sebelumnya bernama SIPUKO (Sistem Informasi Pengajuan Uji Klinik Online) namun disepakati oleh seluruh ke deputian untuk dilakukan perubahan nama dan url aplikasi. Kini aplikasi ini dapat diakses pada url siap-uk.pom.go.id.

Pada tahun 2021, dilakukan pengembangan aplikasi dengan menambah pengajuan Uji Klinik komoditi Pangan Olahan. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 telah dilakukan SIT aplikasi dan terdapat beberapa catatan perbaikan. Selanjutnya tanggal 30 Agustus 2021 telah dilakukan UAT untuk modul Pengajuan Uji Klinik komoditi Pangan Olahan. Peserta yang menghadiri UAT SIAP UK yaitu PT. Equilib Internasional, PT. Kalbe Farma, PT. Prodia Diacro Laboratories, APPNIA sebagai pendaftar. Untuk modul Uji Klinik Pangan Olahan, aplikasi SIAP UK berintegrasi dengan aplikasi e-Standar Pangan (Aplikasi Standardisasi Pangan). Dengan demikian pelaku usaha atau pemohon yang telah terdaftar pada aplikasi tersebut dapat langsung registrasi dengan memasukkan data NPWP.

VIII. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, telah ditetapkan 21 (dua puluh satu) Peraturan Badan POM, 131 (seratus tiga puluh satu) Keputusan Kepala Badan POM, 87 (delapan puluh tujuh) Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan 1 (Satu) Rancangan Undang-Undang dan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul RUU



Rancangan Undang-Undang:

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan

3 Judul RPP



Rancangan Peraturan Pemerintah:

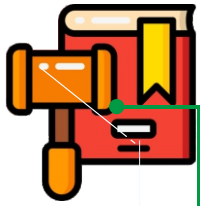
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

25 Judul Peraturan Badan POM



Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 tahun 2021 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Periklanan Obat
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Melalui Penyesuaian/Inpassing
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 tahun 2021 Tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 tahun 2021 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 tahun 2021 Tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan



8. Peraturan Badan POM Nomor 8 tahun 2021 Tentang Bentuk Dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu Yang Dapat Di Produksi Oleh Industri Kosmetika Yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 tahun 2021 Tentang Pelaporan Gratifikasi Di Lingkungan Badan POM.
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan.
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom No 13 Tahun 2020 Tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa.
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Dan Menu Pengawasan Obat Dan Makanan Tahun Anggaran 2021.
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat.
14. Peraturan Badan POM Nomor 14 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik.
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 tahun 2021 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota Dan Penyuluh Keamanan Pangan.
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik.
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 tahun 2021 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional.
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Kuasi, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetika.
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pom Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Lbel Pangan Olahan.
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Dan Mutu Pangan Olahan Di Sarana Peredaran.
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Badan POM.
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.
25. Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik

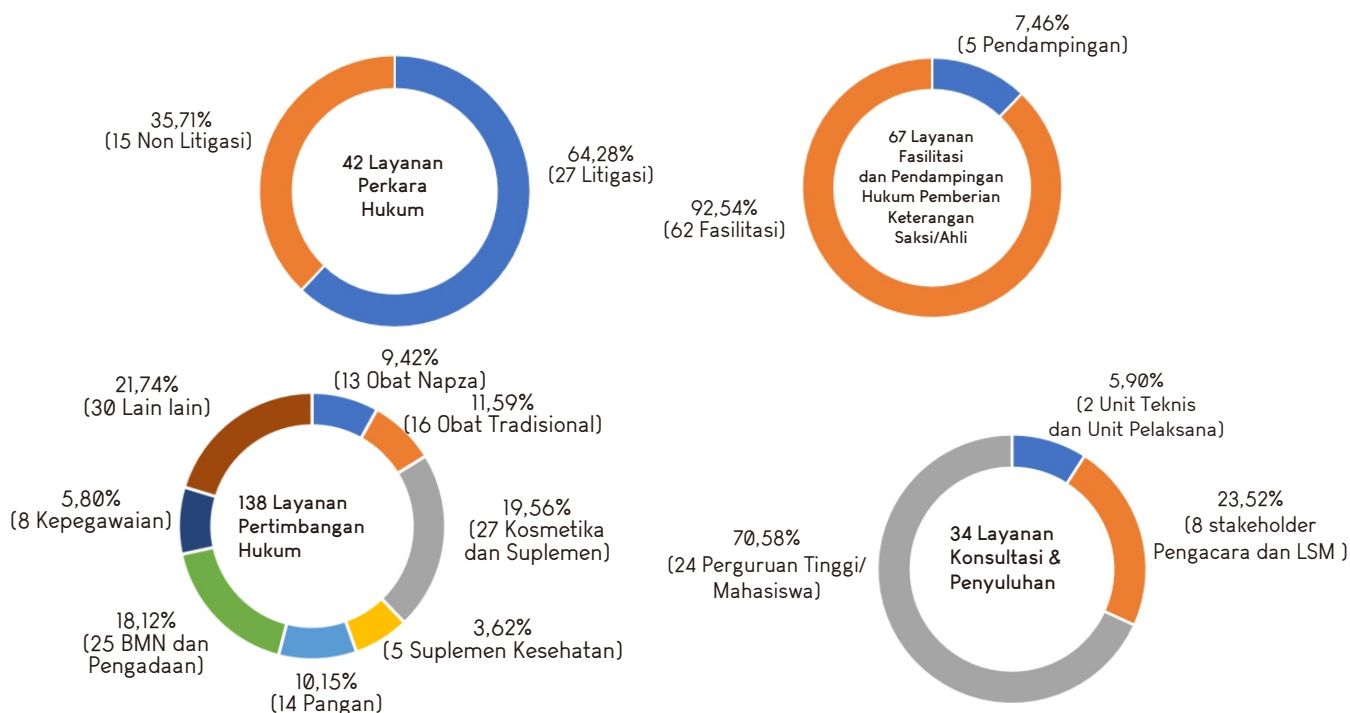
IX. Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Peran unit kerja yang membidangi hukum/legal pada setiap Instansi Pemerintah terkait pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintahan adalah sebagai unit kerja yang mendukung dalam aspek hukum, agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi.

Dukungan aspek hukum dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas Badan POM diberikan oleh Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi berupa Layanan Advokasi Hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021

Jumlah layanan advokasi hukum yang diberikan sejumlah 281 layanan yang terdiri dari:



X. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

a. Penataan dan Penguatan Organisasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan sebagai upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan baik di unit kerja Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM. Dalam rangka upaya peningkatan klasifikasi UPT BPOM serta perkuatan kelembagaan BPOM di Provinsi Kalimantan Utara, Kementerian PANRB telah memberikan persetujuan peningkatan klasifikasi Loka POM di Tarakan menjadi Balai POM di Tarakan yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan harmonisasi Peraturan BPOM tentang Perubahan Peraturan BPOM Nomor 22 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM tanggal 31 Agustus 2021 yang telah mendapatkan hasil dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.01.03-1655 tanggal 20 September 2021 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM melakukan evaluasi kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan BPOM dilaksanakan terhadap 2 (dua) dimensi, terdiri atas dimensi struktur organisasi dan dimensi proses organisasi. Tahapan pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Telah dibentuk Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 ditetapkan melalui Kepka BPOM Nomor HK.02.02.1.2.08.21.349 Tahun 2021.
- 2) Sosialisasi dan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 dengan narasumber Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB dihadiri seluruh Tim Pelaksana Evaluasi Kelembagaan BPOM.
- 3) Pelaksanaan Desk Pengisian Kuesioner Evaluasi Kelembagaan pada Organization Wide Level dan Suborganization Wide Level BPOM tanggal 6 September 2021.
- 4) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan BPOM Tahun 2021 kepada Kepala BPOM melalui Nota Dinas No. OT.01.02.2.22.09.21.614 tanggal 13 September 2021.

b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) BPOM telah dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 23 September 2021 oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB melalui *video conference* dan diikuti Tim Pelaksana RB BPOM Pusat dan Tim RB Eselon I. Evaluasi RB BPOM meliputi 8 (delapan) Area Perubahan RB BPOM dan evaluasi RB Unit Kerja Eselon I di lingkungan BPOM. Pada saat evaluasi disampaikan paparan mengenai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP Tahun 2020 dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi RB Tahun 2020, BPOM memperoleh Indeks RB BPOM 83,51 kategori "A" dan evaluasi AKIP dengan perolehan nilai AKIP BPOM 79,02 kategori "BB". Indeks RB dan Nilai AKIP BPOM Tahun 2021 ditargetkan 81,00 (kategori "A").

c. Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM bertujuan untuk mendorong UPP melakukan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik menuju pelayanan prima, yaitu pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang diberikan oleh penyelenggara layanan kepada penerima. Hasil penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dapat dijadikan sebagai acuan untuk pemilihan lokus UPP yang diikuti pada penilaian evaluasi kinerja UPP oleh Kementerian PANRB tahun 2021.

Telah dilakukan *exit meeting* penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM tanggal 8 Juli 2021 yang diikuti oleh seluruh Kepala UPP BPOM dan tim penilai kinerja UPP BPOM. Berdasarkan penilaian kinerja tahun 2021 diperoleh rata-rata indeks pelayanan publik UPP di lingkungan BPOM sebesar 4,31 (kategori A- atau “Sangat Baik”). Pada penilaian internal UPP tahun 2021 diperoleh hasil 6 (enam) UPP yang akan diusulkan sebagai lokus evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2021 oleh Kementerian PANRB sebagai berikut:

- 1) Balai Besar POM di Denpasar dengan IPP 4,66;
- 2) Balai Besar POM di Yogyakarta dengan IPP 4,57;
- 3) Balai Besar POM di Jakarta dengan IPP 4,54;
- 4) Balai Besar POM di Surabaya dengan IPP 4,52;
- 5) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif dengan IPP 4,52; dan
- 6) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dengan IPP 4,51.

Berdasarkan usulan 6 (enam) yang diusulkan, Kementerian PANRB memilih 1 (satu) lokus evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2021 yaitu Balai Besar POM di Denpasar. Evaluasi penilaian UPP BPOM tahun 2021 oleh Kementerian PANRB telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021.

d. Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM

1. Entry Meeting Pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.04.21.173 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 lebih difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko.

- 1) Aspek kepemimpinan, komitmen dan peran Pimpinan BPOM, Kepala Unit Kerja Pusat, dan Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM sangat menentukan penerapan QMS BPOM secara konsisten di unit organisasinya masing-masing.
- 2) Aspek perencanaan berbasis risiko, implementasinya diintegrasikan dengan pengendalian risiko berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan surat Sekretaris Utama Nomor PI.02.03.2.22.07.21.119 tentang Entry Meeting Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM pada tanggal 5 Juli 2021 telah diadakan entry meeting pelaksanaan Audit Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans QMS ISO 9001:2015 yang dipimpin oleh Sekretaris Utama selaku Deputi Manajemen Puncak dan dihadiri oleh 102 (seratus dua) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 40 (empat puluh) Loka POM dan perwakilan *Lead Auditor* dari PT. Sucofindo (Persero) sebagai pemenang pengadaan jasa konsultasi kegiatan Sertifikasi, Resertifikasi, dan Surveilans ISO 9001:2015 BPOM secara daring.

2. Pendampingan Persiapan Dokumen Mutu Serti kasi QMS ISO 9001:2015 untuk 1 (satu) Unit Kerja Pusat dan 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota

Dalam rangka mempersiapkan dokumen mutu untuk 1 (satu) Unit Kerja Pusat dan 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota yang disertifikasi tahun 2021, dilakukan pendampingan secara daring untuk Unit Kerja Pusat dan Loka POM sebanyak 4 bets kegiatan yaitu:

- 1) Tanggal 28 Juli 2021 untuk Loka POM di Kabupaten Belitung, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya, Loka POM di Kota Sungai Penuh, dan Loka POM di Kabupaten Merauke.
- 2) Tanggal 19 Agustus 2021 untuk Biro Sumber Daya Manusia, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kota Baubau, dan Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- 3) Tanggal 8 September 2021 untuk Loka POM di Kabupaten Sorong, Loka POM di Kota Tanjung Balai, Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan Loka POM di Kabupaten Mimika.
- 4) Tanggal 14 September 2021 untuk Loka POM di Kabupaten Toba, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, dan Loka POM di Kota Dumai.
- 5) Tindaklanjut dari hasil pendampingan adalah Unit Kerja Pusat dan Loka POM Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dokumen sehingga diharapkan pada pelaksanaan audit seluruh dokumen sudah lengkap.

3. Audit Sertifikasi Stage 1 untuk 1 (satu) Unit Kerja Pusat dan 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti kegiatan entry meeting pelaksanaan audit sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 5 Juli 2021, berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PI.02.03.2.22.07.21.316 tanggal 7 Juli 2021 perihal Pelaksanaan Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015, kegiatan audit sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan mulai dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 dengan melakukan audit stage 1 untuk 1 (satu) Unit Kerja Pusat dan 19 (sembilan belas) Loka POM Kabupaten/Kota. Unit Kerja Pusat yang diaudit tersebut adalah Biro Sumber Daya Manusia. Loka POM yang diaudit tersebut adalah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, Loka POM di Kota Tanjung Balai, Loka POM di Kabupaten Toba, Loka POM di Kabupaten Dharmasraya, Loka POM di Kota Dumai, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, Loka POM di Kota Sungai Penuh, Loka POM di Kabupaten Belitung, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Sanggau, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Loka POM di Kota Baubau, Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, Loka POM di Kabupaten Sorong, Loka POM di Kabupaten Mimika, dan Loka POM di Kabupaten Merauke. Kegiatan audit sertifikasi stage 1 selesai dilaksanakan tanggal 23 Juli 2021 dengan hasil 19 (sembilan belas) Loka POM dapat mengikuti audit sertifikasi stage 2.

XI. Kerjasama Internasional

a. Badan POM mengawal transfer teknologi untuk pengembangan obat dan vaksin di Indonesia. Kunci utama keberhasilan pengembangan tersebut adalah kolaborasi antara peneliti, industri farmasi serta pemerintah (triple helix- Academic, Business, and Government/ABG).

Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk percepatan ketersediaan vaksin COVID-19 dan pengembangan industri farmasi pembuatan vaksin COVID-19 di Indonesia, Badan POM melakukan pertemuan dengan mitra kerja sama di Amerika Serikat pada 13-28 September 2021.

Kunjungan Kepala Badan POM ke Amerika Serikat bertujuan untuk mengawal penjajakan rencana kerja sama pengembangan vaksin yang dilakukan oleh PT Bio Farma dengan Moderna Therapeutics Inc. Dan progress kelanjutan kerja sama dengan Baylor College of Medicine (BCM). Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan melakukan penjajakan kerja sama dengan beberapa Pusat Riset khususnya yang dapat mendukung Indonesia dalam pengembangan vaksin dengan berbagai teknologi *platform*, antara lain berbasis mRNA dalam rangka penyediaan vaksin COVID-19 untuk Indonesia dalam jangka panjang.

Kepala Badan POM bersama dengan Wakil Menteri BUMN I dan Wakil Menteri Kesehatan mendampingi PT Bio Farma melakukan penjajakan kerja sama dengan Moderna Therapeutics Inc di Cambridge yang merupakan produsen Vaksin Moderna. Beberapa opsi usulan kerja sama antara PT Bio Farma dan Moderna Therapeutics Inc untuk pengembangan platform vaksin berbasis mRNA untuk COVID-19, termasuk relaksasi regulasi atau kebijakan yang dapat dilakukan oleh Badan POM untuk pengawalan percepatan.



Kerja sama lain yang juga dirintis adalah kerja sama antara PT Bio Farma dengan Baylor College of Medicine (BCM), dalam pengembangan vaksin COVID-19 melalui platform protein subunit. Kepala Badan POM ikut mendampingi proses penandatanganan kesepakatan kerja sama pengembangan vaksin COVID-19 secara resmi antara PT Bio Farma dengan Baylor BCM yang juga disaksikan oleh Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri BUMN I, dan Wakil Menteri Kesehatan. Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia diharapkan mampu memproduksi vaksin sebelum pertengahan tahun 2022 serta mendorong kerja sama penyediaan vaksin halal bagi negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan negara berkembang lainnya.

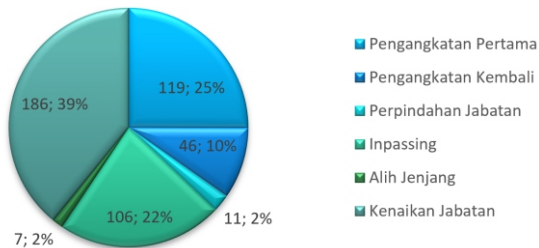
XII. Sumber Daya Manusia

a. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2021, jumlah SDM yang dimiliki BPOM untuk melaksanakan tugas dan fungsi Pengawasan Obat dan Makanan per 22 April 2021 adalah sejumlah 4.812 orang. Berdasarkan kebutuhan dengan perhitungan Beban Kerja Badan POM sampai dengan Tahun 2020-2024 diperoleh ABK sebanyak 10.009 orang pegawai, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai sebanyak 5.175 orang pegawai pada tahun 2021.

Untuk memenuhi kebutuhan pegawai, dilakukan analisis beban kerja untuk mengetahui jenis jabatan dan jumlah pegawai yang diperlukan, termasuk gap (kekurangan) pegawai. Pengisian gap tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme pengisian CPNS, PPPK, mutasi dari internal/eksternal, kenaikan jabatan, dan perpanjangan BUP. Salah satu hal yang menjadi perhatian pada saat pelaksanaan reviu ABK adalah tidak semua data pegawai pada aplikasi SIASN adalah data terkini, dan data pendukung untuk proses validasi ABK (seperti data sarana distribusi, produksi, dll) tidak lengkap sehingga menjadi salah satu hambatan dalam memverifikasi usulan ABK dari unit kerja. Maka perlu dilakukan rekonsiliasi data pegawai di lingkungan Badan POM secara berkala.

Sampai dengan triwulan III tahun 2021, telah dilakukan pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, penyesuaian/inpassing, pengangkatan kembali dan penyetaraan jabatan sebanyak 475 pegawai, dengan rincian sebagai berikut:



Penegakan Hukuman Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan III 2021 yaitu sebanyak 26 orang pegawai dengan hukuman tingkat ringan 20 orang, hukuman tingkat sedang 3 orang dan hukuman berat 3 orang. Jenis pelanggaran peraturan kedisiplinan, pelanggaran jam kerja, izin perkawinan/ perceraian, ketidakmampuan membimbing bawahan, dan tidak menjunjung harkat dan martabat PNS.

Gambar 29. Grafik Sebaran Jabatan Fungsional BPOM

Dilakukan survey Indeks Kesejahteraan Pegawai dimana nilai indeks yang menunjukkan tingkat kesejahteraan pegawai Badan POM. Semakin tinggi indeks kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan POM, maka menunjukkan juga semakin tinggi tingkat kesejahteraan pegawai. Indeks kesejahteraan pegawai diukur melalui survey terhadap beberapa aspek kesejahteraan pegawai, yaitu kompensasi materiil langsung, kompensasi materiil tidak langsung, dan kompensasi non materiil.

Kompensasi materiil langsung terdiri dari unsur gaji dan tunjangan kinerja. Kompensasi materiil tidak langsung terdiri dari unsur:

- Tunjangan kesehatan (BPJS), jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan pensiun dan hari tua
- Layanan kesejahteraan pegawai (Karpeg, karis, karsu, kartu taspen)
- Dana Sosial BPOM

Kompensasi non materiil terdiri dari unsur:

- Pekerjaan dan Kebijakan Instansi
- Relasi sosial di lingkungan kerja
- Penghargaan dan/atau pengakuan instansi
- Layanan kesehatan mental, jasmani dan rohani
- Work life balance

Sebagai Target dengan baseline hasil survei indeks kesejahteraan pegawai sebesar 3,05.

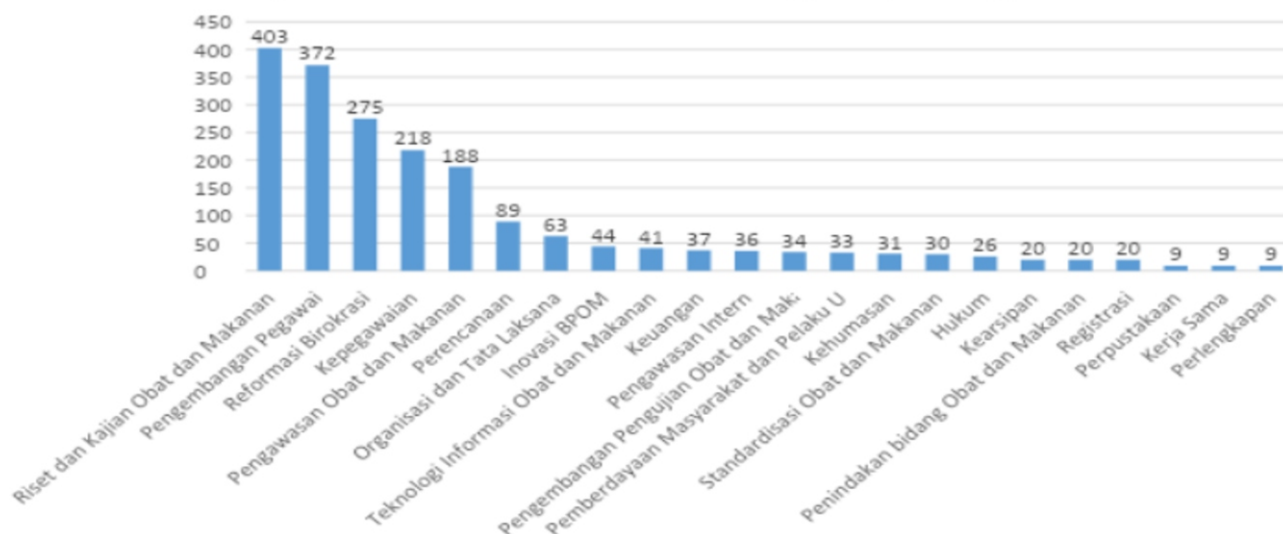
b. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aplikasi IDEAS (*Integrated Development and Training Information System*) merupakan platform pengembangan kompetensi digital terintegrasi di BPOM. Aplikasi IDEAS BPOM dalam mengembangkan kompetensi pegawai memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan dimanapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS BPOM adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai BPOM dengan narasumber yang berasal dari internal BPOM maupun eksternal. Aplikasi IDEAS BPOM juga memiliki keunggulan berupa penerbitan sertifikat *online* dimana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>.

Sampai bulan Sept 2021, Aplikasi IDEAS BPOM sudah digunakan pegawai BPOM untuk kegiatan pengembangan kompetensi dengan jumlah pegawai yang dikembangkan kompetensinya sebanyak 8.714 peserta pelatihan tidak terjadwal dan 6.272 peserta webinar/diskusi *online*. Peserta yang lulus pelatihan tidak terjadwal sebanyak 4.475 peserta sedangkan peserta yang lulus webinar/diskusi *online* sebanyak 5.681 peserta. Rata-rata nilai *post test* yang diperoleh peserta yaitu 75,57 untuk pelatihan tidak terjadwal dan 77,21 untuk webinar/diskusi online.

Aplikasi SIMPHONI merupakan *platform knowledge management* di lingkungan BPOM. Aplikasi SIMPHONI BPOM memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau Unit lain. Sampai Sept 2021, Sampai dengan bulan September 2021, sebanyak 2.007 data/informasi/pengetahuan telah dikelola dalam aplikasi. Pengetahuan yang telah dipublikasikan pada aplikasi SIMPHONI BPOM memiliki berbagai macam fungsi pengetahuan. Fungsi pengetahuan dengan jumlah publikasi paling banyak yaitu Riset dan Kajian Obat dan Makanan dengan jumlah publikasi 403 sedangkan fungsi pengetahuan dengan jumlah publikasi paling sedikit yaitu perlengkapan dengan jumlah publikasi 9.

Data/Informasi/Pengetahuan yang diunggah dalam aplikasi berdasarkan Kategori / Fungsi

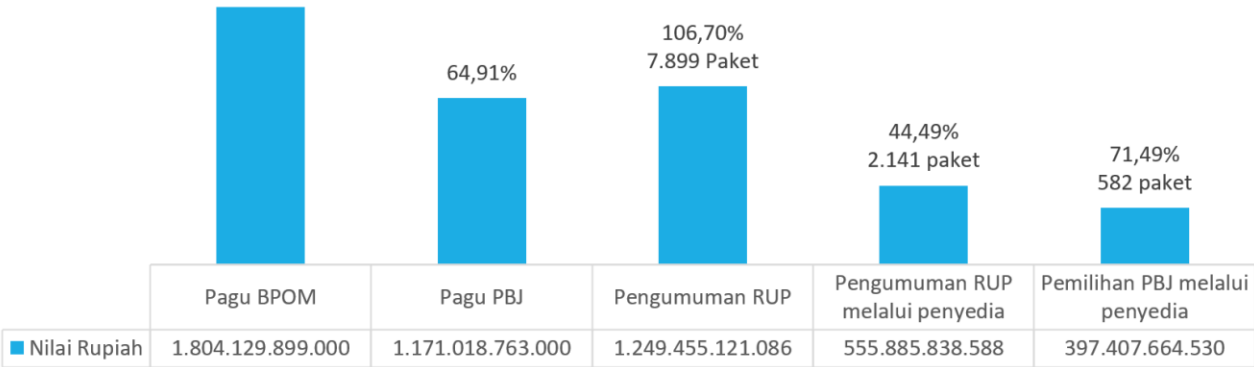


Gambar 30. Grafik Akses dan data informasi yang ada pada Aplikasi SIMPHONI

XIII. Pengadaan Barang Jasa

Pada tahun 2021, total pagu belanja pengadaan barang dan jasa (PBJ) BPOM (Pagu Belanja Barang dan Belanja Modal) setelah revisi penghematan anggaran tahap IV adalah sebesar Rp1.171.018.763.000,- atau 64,91% dari total anggaran Badan POM (Rp1.804.129.899.000). Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, dari total pagu PBJ BPOM tersebut telah diumumkan RUP 7.899 paket senilai Rp1.249.455.121.086,- atau sebesar 106,71%. RUP terumumkan berlebih karena satker belum atau masih dalam proses penyesuaian dampak revisi/ penghematan anggaran. Dalam Rencana Umum Pengadaan BPOM terdapat RUP melalui Penyedia sejumlah 2.141 paket senilai Rp 555.885.838.588,- atau sebesar 44,49% dari total RUP yang diumumkan yang merupakan rencana pelaksanaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia yang telah dilaksanakan sampai dengan 30 September 2021 sebanyak 544 paket dengan nilai Rp388.896.937.965,- (70,10%) dari nilai RUP yang diumumkan melalui Penyedia Rp555.885.838.588,-.

PBJ s.d Triwulan III Tahun 2021



XIV. Pengelolaan anggaran

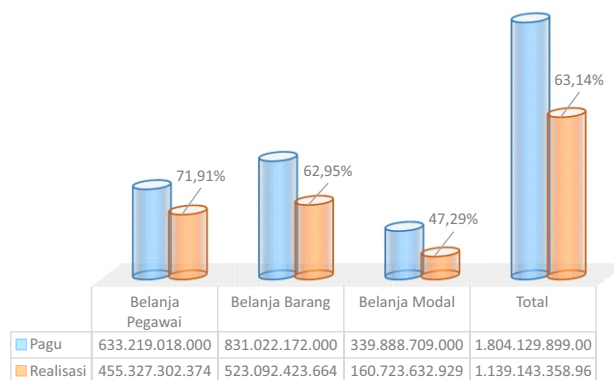
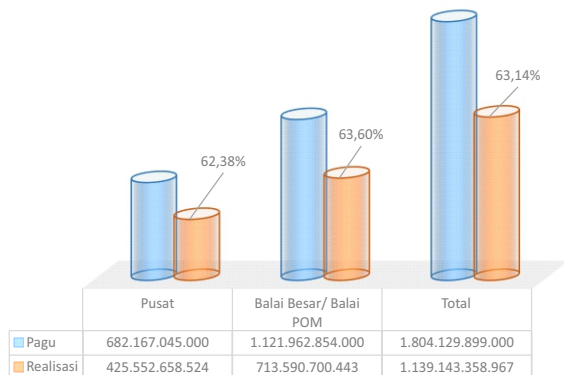
a. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021, estimasi penerimaan negara BPOM yang berasal dari PNBP sebesar Rp168.717.660.000,- yang terdiri dari PNBP fungsional sebesar Rp160.950.624.250,- dan PNBP umum sebesar Rp4.754.583.897,-. Dari jumlah tersebut, realisasi PNBP yang dapat dicapai adalah Rp165.705.208.147,- atau 98,21% dari target yang ditetapkan. Sedangkan, estimasi penggunaannya adalah Rp92.690.213.000,- dengan realisasi penggunaan PNBP mencapai Rp46.650.742.599 atau 49,67%.



b. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan III 2021

Total anggaran BPOM Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.034.185.860.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM dan 15 Loka Satker Mandiri. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2021 sebesar Rp1.139.143.358.967,- (63.14%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk 30 Satker Pusat Rp425.552.658.524,- dan realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp673.752.745.317,-, dan realisasi anggaran untuk Loka Satker Mandiri sebesar Rp39.837.955.126,-.



XV. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2021. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan III tahun 2021 sebagaimana terlampir pada buku ini.

PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta *continuous Improvement*.

LAMPIRAN I

CAPAIAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	84	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Kosmetik	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengawasan Makanan	79	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	67	%	akhir tahun	akhir tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	83,6	%	87,96	105,22
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	%	86,65	108,31
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	86	%	85,25	99,13
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	73	%	77,43	106,07
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	75	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88,4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89	%	92,96	104,45
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	60	%	52,21	87,02
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	88	%	98,03	111,40
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	55	%	54,42	98,95
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	63	%	73,93	117,35
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	3,76	Nilai Indeks	4,22	112,23
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	74	Nilai	92,74	125,32
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	1.330	Sekolah	progres	62,43
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	427	Desa	progres	66,33
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	165	Pasar	progres	72,78
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	%	72,15	84,88

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	77	%	73,18	95,04
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	69	%	77,3	112,03
		Indeks RB UPT	85	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP UPT	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	Nilai Indeks	1,64	82,00
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	Nilai	75,1	79,89
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (92%)	%	95	103,26
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	70	%	81,25	116,07
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	70	%	70,59	100,84
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	80	%	80,61	100,76
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	70	%	100	142,86
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	Efisien (89%)	%	75	84,27
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen Obat dan Makanan yang berkualitas	78	%	68,75	88,14
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	77	%	86,76	112,68
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	77	%	71,43	92,77
		Persentase laporan informasi dan laporan intelijen UPT yang sesuai pedoman	50	%	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2	Nilai Indeks	1,5	75,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen	Efisien (89%)	%	75	84,27
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi Obat Tradisional yang memenuhi persyaratan CPOTB	80	%	85,34	106,68
		Persentase iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	63	%	57,7	91,59

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh Balai/ Balai Besar POM	82	%	100	121,95
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76	%	78,57	103,38
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	74	%	77,87	105,23
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93	%	94,67	101,80
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	89	%	94,67	106,37
		Indeks Pelayanan Publik dibidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	3,46	Nilai Indeks	4,14	119,65
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang optimal	2	Nilai Indeks	0,75	37,50

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	95	95,96
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko	38	%	30,83	81,13
		Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pangan Olahan Oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	77	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	87	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	3,46	Indeks	4,44	128,32
		Persentase Keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang di selesaikan tepat waktu	87	%	98,59	113,32
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	87	%	90,35	103,85
		Persentase Sarana produksi yang diinspeksi dalam rangka pendalaman mutu hasil pengawasan pangan risiko tinggi dan teknologi baru	87,00	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang Diberikan	83	%	91,56	110,31
		Persentase tingkat pemahaman UPT terhadap sistem Pengawasan Produksi Pangan Olahan	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	88,00	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase koordinasi pengawasan produksi pangan fortifikasi yang dilaksanakan	70	%	54	77,14
		Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Pengawasan Pangan Olahan sesuai standar	125	Jumlah	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi makanan	51	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	1,5	75,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang baik	Efisien (90%)	%	86	95,56
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase Sarana Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86	%	73,86	85,88
		Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan	86	%	61,11	71,05
		Persentase pemenuhan ketentuan pengawasan kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	84	%	93,15	110,89
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetik yang Diselesaikan Tepat Waktu	86	%	86,31	100,36
		Persentase Hasil Pengawasan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Pelaku usaha/Stakeholder	82	%	59,70	72,80
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	89	%	77,47	87,04

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	81	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	91	%	98,11	107,82
		Indeks Pelayanan Publik di bidang pengawasan kosmetik	3,76	Indeks	4,36	115,96
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Kosmetik	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Kosmetik	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	2	Nilai Indeks	0,75	37,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	Efisien (100%)	%	90	90,00
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	72	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di Bidang Distribusi Obat	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	81	%	83,17	102,68
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	66	%	75,62	114,58
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	80	%	97,38	121,73
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3,76	Nilai Indeks	4,08	108,51

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indek RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	91	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	77	Nilai Indeks	89,28	115,95
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yang optimal	2	Nilai Indeks	1	50,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	Efisien (88%)	%	91,92	104,45
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	86,5	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	84,7	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepatuhan industri Produk Tembakau dalam iklan dan label	47	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18.000	Permohonan	15.381	85,45
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	72	%	60,73	84,35
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3,46	Nilai Indeks	4,52	130,64
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang obat	89,04	Nilai	93,1	104,56

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	73,22	104,60
		Persentase laporan pengawasan mutu, label dan iklan obat dan NPP yang ditindaklanjuti	86	%	51,81	60,24
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60.200	Label dan Iklan	56.250	93,44
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2	Nilai Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Efisien (98%)	%	95	96,94
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	30	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	89,5	%	91,08	101,77
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang dilakukan pendalam mutu dan memenuhi ketentuan	60	%	62,92	104,87

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	94	%	97,17	103,37
		Persentase insiden/kasus keamanan pangan yang ditindaklanjuti	85	%	76,27	89,73
		Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan peredaran makanan	65	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,76	Indeks	4,51	119,95
		Persentase keputusan penilaian sarana distribusi dan produk Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	90	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	95	%	84,21	88,64
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	2	Indeks	1,5	75,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	92	%	92	100,00
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase sarana produksi obat yang mandiri dalam pemenuhan CPOB	55	%	71,88	130,68

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan sarana produksi	86,5	Indeks	58,62	67,77
		Persentase sarana produksi obat JKN, bahan baku, dan obat high risk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	74	%	55,56	75,08
		Persentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil Pengawasan sarana produksi di Balai	95	%	65,00	68,42
		Persentase produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	86	%	88,27	102,64
		Persentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	74	%	87,88	118,76
		Persentase keputusan penilaian fasilitas produksi bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	70	%	63,70	91,01
		Indeks Pelayanan Publik	3,76	Indeks	4,26	113,30
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawalan inovasi pengembangan obat	65	%	68,75	105,77
		Nilai RB Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi ONPP	Efisien (95%)	%	100	105,26
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	81	%	79,98	98,74

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87	Indeks	84,09	96,66
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	79	%	79,44	100,56
		Persentase hasil penilaian registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	99,7	104,95
		Persentase pengaduan terkait registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4,36	Indeks	4,63	106,19
		Persentase pendampingan di bidang registrasi pangan olahan yang efektif	76	%	93,11	122,51
		Persentase deregulasi dan debirokratisasi di bidang registrasi pangan olahan	40	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	2,5	125,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Efisien (97%)	%	92	94,85
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	73	%	82,33	112,78
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi Obat	84,5	Indeks	88,54	104,78
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	66	%	68,7	104,09
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	73	%	80,12	109,75

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persen pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi Obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100,00
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat	3,76	Nilai Indeks	3,99	106,12
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	81	%	33,33	41,15
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100,00
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2	Indeks	0,75	37,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	Efisien (93%)	%	100	107,53
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	86	%	84,25	97,96
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	82	Nilai Indeks	84,50	103,05
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	72	%	86,59	120,26
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	73	%	94,63	129,63
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,76	Nilai Indeks	4,07	108,24

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	69	%	77,82	112,78
		Persentase pendampingan di bidang registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Pratinak/Klinik dan DIP yang efektif	76	%	79,50	104,61
		Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	82	%	82,92	101,12
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	92	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kosmetik yang baik	2	%	2	100,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (96%)	%	88	91,67
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	83	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	90	%	100	111,11
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibandingkan dengan yang direncanakan	90	%	76	84,44

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	90	%	114	126,67
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90	%	97	107,78
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang baik di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2	Indeks	2,75	137,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100,00
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,5	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Pangan Olahan sesuai roadmap	100	%	100	100,00
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	92	%	79,56	86,48
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88	%	89,52	101,73

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar	80	%	73	91,25
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85	%	97,46	114,66
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,06	Indeks	4,43	109,11
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2	Indeks	3	150,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	Efisien (100%)	%	92	92,00
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	76	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif sesuai roadmap	83	%	100	120,48
		Persentase standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	86	%	88,57	102,99
		Persentase sosialisasi standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif kepada stakeholder yang efektif	88	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	77	Nilai Indeks	85,35	110,84

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang optimal	2	Nilai Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Efisien (100%)	%	100	100,00
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	52	UMKM	akhir tahun	akhir tahun
		Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTF	32	%	15,12	47,25
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	82	%	11,33	13,82
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	160	Kab/Kota	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pemberdayaan keamanan pangan sesuai Pedoman	82	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Jumlah pelaku UMKM Makanan yang diintervensi keamanan pangan	18.000	Jumlah	13.956	77,53
		Jumlah kader/fasilitator yang memahami prinsip keamanan pangan	300	Jumlah	284	94,67
		Tingkat efektivitas KIE Makanan	89,37	nilai	93,64	104,78
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	3,46	Indeks	4,44	128,32
		Jumlah pemda yang diintervensi keamanan pangan	203	Prov/Kab/Kota	238	117,24

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UPT BPOM yang dibina dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	100	%	100	100,00
		Indeks RB Dit PMPU	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Dit PMPU	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2	Indeks	2,25	112,50
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit PMPU	Efisien (91%)	%	92	101,10
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian	76	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM	5	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN	86	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar GLP	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	74	%	72	97,30
		Persentase Baku Pembanding yang dikembangkan terhadap kebutuhan	77	%	74	96,10
		Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi terhadap standar	87	%	53	60,92
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang	92	%	96,3	104,67
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4,06	Nilai Indeks	4,34	106,90
		Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif	57	%	23,1	40,53
		Indeks RB PPPOMN	92	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	84	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2	Indeks	1,75	87,50
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	94,15	nilai	49,5	52,58
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPPOMN	Efisien (91%)	%	92	101,10
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	65	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pemenuhan nilai kinerja penyidikan oleh UPT BPOM	76	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil koordinasi lintas sektor di bidang penyidikan yang ditindaklanjuti	75	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase perkara yang meningkat tahapan penyelesaiannya dengan adanya dukungan teknis	55	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase pendalaman informasi penyidikan yang berhasil menjadi SPDP	55	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase barang bukti yang selesai ditangani sesuai standar	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	89	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	82	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang optimal	2	Nilai Indeks	0,75	37,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien (90%)	%	92	102,22
1.20	Riset dan kajian di bidang obat dan makanan	Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	75	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100,00
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian dan kesesuaian dengan timeline	84	%	74,81	89,06
		Nilai kualitas publikasi hasil riset dan kajian	75	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	90	Nilai Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	84	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	77	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi PRKOM yang optimal	2	Indeks	2,25	112,50
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	94	nilai	46,72	49,70
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan	Efisien (93%)	%	75	80,65
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemda yang menerapkan program keamanan OT, SK dan Kos	45	%	45	100,00
		Persentase duta yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat	82	%	67	81,71
		Persentase pemda yang diintervensi dalam rangka pendampingan UMKM dan penerapan keamanan OT, Kos dan SK	73	%	45	61,64
		Persentase pemda yang diintervensi dalam pemberdayaan masyarakat di bidang keamanan OT, SK dan Kos	45	%	45	100,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase UMKM Obat Tradisional yang memenuhi standar (s/d 2021)	87	%	56,67	65,14
		Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar (s/d 2021)	70	%	88	125,71
		Tingkat efektivitas KIE Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	90,59	%	89,59	98,90
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,57	Indeks	3,57	100,00
		Jumlah komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	55	Komunitas	37	67,27
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	80	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	2	Indeks	0,5	25,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Efisien (99%)	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Persentase hasil patroli siber yang efektif	57	%	66,23	116,19
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Siber Obat dan Makanan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang optimal	2	Indeks	0,5	25,00
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	89	%	akhir tahun	akhir tahun
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	43,25	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Opini BPK atas laporan keuangan BPOM	WTP	Opini	WTP	100
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	76,73	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Media	73,5	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	67	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kerjasama yang efektif	84	%	70,99	84,51
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	10,17	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8,28	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Mitra Kerja Inspektorat Utama	3,7	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditolerans	<1	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan	73	%	70,04	95,95
		Jumlah negara selatan-selatan penerima program KSS mengenai penguatan fungsi regulatori	2	negara	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerjasama dan Humas	3,84	Indeks	3,62	94,27
		Indeks kepuasan media	7,35	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	67	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	82	%	85,6	104,39
		Jumlah dokumen Kerja Sama Badan POM	84	Dokumen	60	71,43
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99,6	%	99,79	100,19
		Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2	Indeks	0,75	37,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	Efisien (90%)	%	75	83,33
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan akuntabilitas	5,25	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	76,73	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	94	Nilai	86,07	91,56
		Nilai Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BPOM	94,87	Nilai	94,1	99,19

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100	%	75	75,00
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3,8	Indeks	3,42	90,00
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kinerja satker terhadap pedoman	87	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	50	50,00
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja anggaran minimal 95 berdasarkan mekanisme reward dan punishment	25,6	%	13,9	54,30
		Persentase dokumen penganggaran yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	80	80,00
		Persentase laporan capaian kinerja dan anggaran sesuai pedoman	63	%	77,54	123,08
		Persentase dokumen monitoring, evaluasi, dan laporan kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	%	78,26	78,26
		Persentase satker yang memperoleh nilai kinerja pelaksanaan anggaran minimal Baik	81	%	91,38	112,81
		Persentase dokumen laporan keuangan satker yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	75	75,00
		Persentase laporan PNB unit kerja yang disampaikan tepat waktu	96	%	98	102,08
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	75,1	Nilai	82,24	109,51
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	89	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan yang baik	2	Indeks	2,5	125,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro	Efisien	Nilai	95	95,00
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	3,8	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	4,9	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai RB BPOM penataan tata laksana	4,4	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	83	Indeks	93,38	112,51
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi	3,6	Indeks	3,74	103,89
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	100	%	78,04	78,04
		Persentase advokasi hukum yang diselesaikan	83	%	93,84	113,06
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai Ditindaklanjuti	99,2	%	99,19	99,99
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang Dilaksanakan	90,76		93,83	103,38
		Indeks Pelayanan Publik	4,06	Indeks	4,59	113,05
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal	2	%	0,25	12,50
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (95%)	Nilai	85,42	89,92
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	13,2	Nilai	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Sistem Merit	Level 4	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3,71	Indeks	3,41	91,91
		Persentase ASN BPOM yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	75	Indeks	43,26	57,68
		Persentase ASN BPOM yang memiliki kinerja berkriteria minimal baik	91	%	99,83	109,70
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3,21	Indeks	3,05	95,02
		Persentase ABK yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Ketentuan	70	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Data ASN yang Dimutakhirkan	80	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Biro SDM	90	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN di Sekretariat Utama	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM yang optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	Efisien (100%)	Indeks	86	86,00
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM POM yang memenuhi Standar Kompetensi	82	%	77,88	94,98
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar	820	SDM	586	71,46
		Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan	4,3	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM	45	%	52,03	115,62
		Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti	12	Kerja Sama	10	83,33
		Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4,4	Nilai	4,52	102,73
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi	91	%	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase realisasi rencana aksi RB Badan POM terkait Manajemen Perubahan	87	%	68	78,16
		Indeks RB PPSDM POM	90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	77	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2	Indeks	1	50,00
		Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94	Nilai	95,09	101,16
		Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	Efisien (92%)	Nilai	100	108,70
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Indeks SPBE Badan POM	3,95	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Badan POM	100	%	76,92	76,92
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	2,9	%	3,27	112,76
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	100	%	95,29	95,29
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	23	%	20	86,96
		Persentase Kerjasama Sistem TIK yang ditindaklanjuti	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	55	%	46,02	83,67
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	76,47	76,47
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	69,32	69,32
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	91	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	84	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	77	Indeks	akhir tahun	akhir tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	2	Indeks	2	100,00
		Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Data	25	%	23,46	93,84
		Sertifikasi ISO 27001	1	Sertifikat	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94	Nilai	76,83	81,73
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	Efisien (89%)	Nilai	88	98,88
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,99	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat I	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	80	%	100	125,00
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat I	< 1	%	0,014	101,00
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	90	%	94,86	105,40
		Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat I	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat I	80	Nilai	74,99	93,74
		Persentase rekomendasi Pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	92	%	97,06	105,50
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat I yang ditindaklanjuti dengan tuntas	85	%	70	82,35

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Inspektorat I	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Inspektorat I	86	Indeks	85,96	99,95
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2	Indeks	0,75	37,50
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	Efisien (89%)	%	75	84,27
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	6,99	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai rata rata evaluasi AKIP mitra kerja inspektorat II	85	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mitra kerja Inspektorat II	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi lingkup Inspektorat II	< 1	%	0,02	100,98
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja inspektorat II	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	81	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100	%	100	100,00
		Nilai peer review terhadap pengawasan intern Inspektorat II	80	Nilai	74,99	93,74
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat II yang ditindaklanjuti	92	%	98,18	106,72
		Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti secara tuntas	85	%	100	117,65
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti	100	%	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	100	%	50	50,00

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Persentase rekomendasi hasil revid PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti	100	%	71,5	71,50
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti	90	%	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks RB Inspektorat II	92	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	3,7	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86	Indeks	85,54	99,47
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	Efisien (89%)	%	75	84,27
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	90	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Nilai Pengelolaan BMN BPOM	80	Nilai	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	64% dari indeks	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3,73	Indeks	3,3	88,47
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Standar	80	Persen	35	43,75
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	87	Persen	96	110,34
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	91	Persen	123,91	136,16
		Persentase Satker yang mengelola Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perencanaan	91	Level	akhir tahun	akhir tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	75	Persen	86,68	115,57

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1	2	3	4	5	6	7=6/4*100
		Indeks RB Biro Umum	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks profesionalitas ASN Biro Umum	83	Indeks	akhir tahun	akhir tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2	Indeks	1	50,00
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	100	Persen	90	90,00

LAMPIRAN III

SERAPAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2021
SUMBER: APLIKASI OMSPAN
(Per 30 September 2021)

A. Unit Pusat

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan	337.459.536.000	204.484.364.962	60,60%
1.1	Biro Kerjasama	9.122.289.000	5.371.337.703	58,88%
1.2	Biro Perencanaan Dan Keuangan	13.859.474.000	7.457.171.497	53,81%
1.3	Biro Hukum Dan Organisasi	9.510.253.000	6.170.494.365	64,88%
1.4	Biro Umum	297.602.889.000	180.932.038.621	60,80%
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	7.364.631.000	4.553.322.776	61,83%
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	35.120.770.000	21.319.889.975	60,70%
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	6.137.138.000	3.663.067.008	59,69%
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	7.220.918.000	4.302.177.880	59,58%
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor	6.624.229.000	4.236.648.143	63,96%
2.4	Dit. Registrasi Obat	8.210.000.000	4.615.345.759	56,22%
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	6.928.485.000	4.502.651.185	64,99%
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	34.359.264.000	20.506.187.447	59,68%
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	7.955.749.000	5.531.217.303	69,52%
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	6.341.990.000	3.689.168.060	58,17%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	7.237.542.000	4.094.451.577	56,57%
3.4	Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	5.169.863.000	3.461.716.856	66,96%
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	7.654.120.000	3.729.633.651	48,73%
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	42.573.292.000	25.752.693.102	60,49%
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	9.929.701.000	6.159.671.499	62,03%
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	9.127.146.000	4.947.277.303	54,20%
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	6.781.527.000	4.367.228.017	64,40%
4.4	Dit. Standardisasi Pangan Olahan	7.012.347.000	4.856.870.914	69,26%
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	9.722.571.000	5.421.645.369	55,76%
5	Deputi Bidang Penindakan	24.731.273.000	15.534.214.884	62,81%
5.1	Dit. Siber Obat Dan Makanan	4.043.710.000	2.673.626.514	66,12%
5.2	Dit. Intelijen Obat Dan Makanan	6.903.694.000	3.877.897.500	56,17%
5.3	Dit. Penyidikan Obat Dan Makanan	6.928.087.000	4.091.720.240	59,06%
5.4	Dit. Cegah Tangkal	6.855.782.000	4.890.970.630	71,34%
6	Inspektorat Utama	20.095.728.000	13.884.030.373	69,09%
6.1	Inspektorat I	15.947.246.000	11.258.795.415	70,60%
6.2	Inspektorat II	4.148.482.000	2.625.234.958	63,28%
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	89.006.119.000	66.180.162.409	74,35%
8	Pusat Riset Dan Kajian Obat Dan Makanan	16.546.638.000	8.433.511.069	50,97%
9	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	41.043.220.000	19.881.059.103	48,44%
10	Pusat Pengembangan Sdm Pengawasan Obat Dan Makanan	41.231.205.000	29.576.545.200	71,73%
	TOTAL SATKER PUSAT	682.167.045.000	425.552.658.524	62,38%

B. Balai Besar / Balai POM

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	Balai POM Sofifi	13.457.826.000	10.802.967.687	80,27%
2	Balai POM Mamuju	18.164.583.000	7.364.937.381	40,55%
3	Balai Besar POM Jakarta	41.616.698.000	24.469.202.781	58,80%
4	Balai Besar POM Bandung	50.490.769.000	31.278.419.477	61,95%
5	Balai Besar POM Semarang	46.459.983.000	30.860.175.098	66,42%
6	Balai Besar POM Yogyakarta	35.309.957.000	21.914.014.463	62,06%
7	Balai Besar POM Surabaya	45.791.819.000	31.449.547.615	68,68%
8	Balai Besar POM Banda Aceh	34.781.626.000	23.781.243.061	68,37%
9	Balai Besar POM Medan	48.761.724.000	35.829.787.491	73,48%
10	Balai Besar POM Padang	41.062.152.000	25.872.808.616	63,01%
11	Balai Besar POM Pekanbaru	32.788.927.000	21.914.299.402	66,83%
12	Balai POM Jambi	27.935.911.000	14.662.200.874	52,49%
13	Balai Besar POM Palembang	31.772.128.000	23.878.859.328	75,16%
14	Balai Besar POM Bandar Lampung	27.328.670.000	17.107.905.560	62,60%
15	Balai Besar POM Pontianak	27.883.346.000	16.813.920.963	60,30%
16	Balai Besar POM Palangkaraya	23.606.205.000	16.860.672.699	71,42%
17	Balai Besar POM Banjarmasin	47.356.942.000	25.370.662.962	53,57%
18	Balai Besar POM Samarinda	41.031.751.000	24.373.561.757	59,40%
19	Balai Besar POM Manado	37.118.495.000	23.866.621.356	64,30%
20	Balai POM Palu	28.119.862.000	17.499.270.041	62,23%
21	Balai Besar POM Makassar	43.091.203.000	28.202.231.445	65,45%
22	Balai POM Kendari	20.126.241.000	14.567.770.044	72,38%
23	Balai POM Ambon	21.901.466.000	15.106.782.783	68,98%
24	Balai Besar POM Denpasar	43.636.626.000	29.299.863.882	67,15%
25	Balai Besar POM Mataram	27.005.026.000	19.573.199.929	72,48%
26	Balai POM Kupang	27.919.789.000	13.957.133.738	49,99%
27	Balai Besar POM Jayapura	32.443.548.000	19.500.808.410	60,11%
28	Balai POM Bengkulu	27.510.950.000	20.971.401.231	76,23%
29	Balai Besar POM Serang	29.597.480.000	16.990.809.526	57,41%
30	Balai POM Batam	25.980.907.000	13.100.691.317	50,42%
31	Balai POM Pangkal Pinang	20.615.041.000	11.517.331.823	55,87%
32	Balai POM Gorontalo	18.722.057.000	9.697.099.133	51,80%
33	Balai POM Manokwari	24.079.803.000	15.296.543.444	63,52%
TOTAL SATKER BALAI		1.063.469.511.000	673.752.745.317	63,35%

C. Loka POM Satker Mandiri

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	%
1	Loka POM Kota Surakarta	4.796.612.000	3.045.356.230	63,49%
2	Loka POM Kota Tasikmalaya	4.017.175.000	2.744.185.989	68,31%
3	Loka POM Kabupaten Kediri	3.165.165.000	2.299.039.539	72,64%
4	Loka POM Kabupaten Jember	3.097.021.000	2.143.535.099	69,21%
5	Loka POM Kabupaten Banyumas	4.007.520.000	2.616.783.885	65,30%
6	Loka POM Kota Palopo	3.805.738.000	2.878.954.809	75,65%
7	Loka POM Kabupaten Bogor	3.862.678.000	2.633.329.330	68,17%
8	Loka POM Kabupaten Tangerang	3.921.976.000	2.626.339.458	66,96%
9	Loka POM Kota Tarakan	5.751.400.000	3.758.023.276	65,34%
10	Loka POM Kota Dumai	3.640.693.000	2.511.761.445	68,99%
11	Loka POM Kota Baubau	3.977.156.000	2.444.426.249	61,46%
12	Loka POM Kota Lubuklinggau	3.033.414.000	2.144.145.384	70,68%
13	Loka POM Kabupaten Mimika	3.420.771.000	2.384.208.812	69,70%
14	Loka POM Kabupaten Ende	4.119.229.000	2.694.343.832	65,41%
15	Loka POM Kabupaten Kepulauan Tanimbar	3.876.795.000	2.913.521.789	75,15%
	TOTAL SATKER LOKA MANDIRI	58.493.343.000	39.837.955.126	68,11%
	TOTAL SATKER PUSAT DAN UPT	1.804.129.899.000	1.139.143.358.967	63,14%

LAMPIRAN III

PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
FUNGSIONAL
(Per 30 September 2021)

Pendapatan Negara Bukan Pajak Fungsional Badan Pengawas Obat dan Makanan

No	NAMA UNIT	NILAI
1	Balai Besar Pom Di Bandar Lampung	385.120.000
2	Balai Besar Pom Serang	136.500.000
3	Balai Besar Pom Di Dki Jakarta	13.680.000
4	Balai Besar Pom Di Bandung	398.990.000
5	Balai Besar Pom Di Semarang	519.230.000
6	Balai Besar Pom Di Yogyakarta	146.510.000
7	Balai Besar Pom Di Surabaya	1.691.570.000
8	Balai Besar Pom Di Pontianak	644.880.000
9	Balai Besar Pom Palangkaraya	432.970.000
10	Balai Besar Pom Di Banjarmasin	743.590.000
11	Balai Besar Pom Di Samarinda	279.180.000
12	Balai Pom Di Gorontalo	82.230.000
13	Balai Besar Pom Di Manado	185.015.000
14	Balai Pom Di Palu	112.020.000
15	Balai Besar Pom Di Makassar	289.625.000
16	Balai Pom Di Kendari	285.925.000
17	Balai Besar Pom Di Denpasar	247.145.000
18	Balai Besar Pom Di Mataram	868.305.000
19	Balai Pom Di Kupang	147.525.000
20	Balai Pom Di Ambon	106.915.000
21	Balai Besar Pom Di Jayapura	211.095.000
22	Balai Pom Di Manokwari	118.375.000
23	Balai Pom Di Mamuju	1.300.000
24	Sekretariat Utama	
25	Loka Pom Di Kabupaten Ende	4.260.000
26	Direktorat Registrasi Obat	26.945.800.000
27	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	1.898.300.000
28	Direktorat Pengawasan Distribusi Dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor	2.151.000.000

No	NAMA UNIT	NILAI
29	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, Dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif	1.529.700.000
30	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	65.242.750.000
31	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan	1.290.000.000
32	Direktorat Pengawasan Kosmetik	13.234.100.000
33	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	
34	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	23.202.612.500
35	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah Dan Sedang	9.412.650.000
36	Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi Dan Teknologi Baru	402.000.000
37	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	4.338.636.750
38	Balai Besar Pom Di Banda Aceh	94.185.000
39	Balai Besar Pom Di Medan	816.385.000
40	Balai Besar Pom Di Padang	647.580.000
41	Balai Besar Pom Di Pekanbaru	347.000.000
42	Balai Pom Di Batam	594.490.000
43	Balai Besar Pom Di Palembang	130.060.000
44	Balai Pom Di Pangkal Pinang	115.250.000
45	Balai Pom Di Jambi	634.385.000
46	Balai Pom Di Bengkulu	297.810.000
47	Belum Dikonfirmasi	-
Jumlah		122.329.594.250

LAMPIRAN IV

PROGRES PEMILIHAN PENYEDIA SATKER
(Per 30 September 2021)

Progres Pemilihan Penyedia Satker

No	Nama Satuan Kerja	RUP Melalui Penyedia	Pemilihan	%
1	Balai Pom Di Kendari	2.126.472.000	4.570.860.988	214,95%
2	Balai Besar Pom Di Bandar Lampung	3.125.400.000	3.799.656.544	121,57%
3	Balai Pom Di Bengkulu	7.533.765.000	8.838.112.477	117,31%
4	Balai Pom Di Pangkal Pinang	6.026.072.000	6.653.802.115	110,42%
5	Balai Besar Pom Di Samarinda	20.143.241.888	21.795.627.561	108,20%
6	Loka Pom Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	445.000.000	449.988.000	101,12%
7	Balai Pom Di Batam	7.564.921.000	7.622.357.479	100,76%
8	Loka Pom Di Kabupaten Bogor	200.000.000	200.000.000	100,00%
9	Loka Pom Di Kota Lubuklinggau	409.165.000	408.964.000	99,95%
10	Loka Pom Di Kota Tarakan	450.000.000	445.885.000	99,09%
11	Balai Besar Pom Di Serang	11.405.392.500	10.902.662.997	95,59%
12	Balai Besar Pom Di Banjarmasin	23.366.293.000	22.042.413.814	94,33%
13	Loka Pom Di Kota Tasikmalaya	376.440.000	350.012.900	92,98%
14	Balai Besar Pom Di Palembang	13.322.748.000	12.368.219.018	92,84%
15	Balai Besar Pom Di Surabaya	10.498.852.500	9.594.200.440	91,38%
16	Balai Besar Pom Di Banda Aceh	10.431.594.600	9.242.184.705	88,60%
17	Loka Pom Di Kabupaten Ende	511.800.000	432.770.800	84,56%
18	Balai Besar Pom Di Manado	11.433.868.000	9.582.285.340	83,81%
19	Balai Besar Pom Di Denpasar	14.945.745.000	12.522.550.011	83,79%
20	Balai Besar Pom Di Mataram	7.134.020.000	5.918.191.940	82,96%
21	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	44.327.713.000	36.645.333.776	82,67%
22	Balai Besar Pom Di Semarang	7.868.635.000	6.500.843.261	82,62%
23	Balai Pom Di Sofifi	3.461.188.000	2.842.944.800	82,14%
24	Balai Pom Di Gorontalo	5.908.132.000	4.843.739.883	81,98%
25	Balai Besar Pom Di Bandung	13.898.129.000	11.135.145.066	80,12%
26	Loka Pom Di Kabupaten Tangerang	1.018.025.000	807.404.999	79,31%
27	Balai Besar Pom Di Medan	16.250.622.000	12.659.355.916	77,90%
28	Balai Besar Pom Di Pontianak	9.121.833.000	7.088.688.852	77,71%
29	Balai Pom Di Palu	12.185.654.000	9.324.100.410	76,52%
30	Balai Besar Pom Di Makassar	10.794.355.000	8.227.870.250	76,22%

No	Nama Satuan Kerja	RUP Melalui Penyedia	Pemilihan	%
31	Balai Besar Pom Di Yogyakarta	13.619.349.000	10.315.165.713	75,74%
32	Balai Pom Di Jambi	7.557.687.000	5.669.303.200	75,01%
33	Balai Pom Di Kupang	8.448.467.000	6.326.866.806	74,89%
34	Balai Besar Pom Di Jakarta	18.459.732.000	13.518.172.690	73,23%
35	Balai Besar Pom Di Palangkaraya	5.816.372.000	4.229.384.450	72,72%
36	Balai Besar Pom Di Jayapura	11.666.202.000	8.343.722.900	71,52%
37	Loka Pom Di Kota Surakarta	926.991.000	661.900.000	71,40%
38	Balai Besar Pom Di Padang	10.183.138.000	7.233.149.342	71,03%
39	Balai Pom Di Ambon	8.125.401.600	5.503.682.629	67,73%
40	Balai Pom Di Manokwari	10.891.448.000	7.323.822.790	67,24%
41	Loka Pom Di Kabupaten Banyumas	325.300.000	214.300.000	65,88%
42	Sekretariat Utama Badan Pom	100.473.241.000	59.005.841.322	58,73%
43	Balai Besar Pom Di Pekan Baru	8.426.268.000	4.668.579.500	55,41%
44	Loka Pom Di Kabupaten Kediri	216.700.000	111.700.000	51,55%
45	Deputi I Bidang Pengawasan Obat Narkotika Psikotropika Prekursor Dan Zat Adiktif	2.237.366.000	1.066.525.380	47,67%
46	Pusat Riset Dan Kajian Obat Dan Makanan	6.726.601.000	3.074.728.800	45,71%
47	Pusat Data Dan Informasi Obat Dan Makanan	22.494.385.000	9.151.808.377	40,68%
48	Loka Pom Di Kota Palopo	213.737.000	76.880.000	35,97%
49	Inspektorat Utama Badan Pom	1.010.481.000	293.440.030	29,04%
50	Loka Pom Di Kabupaten Jember	294.960.000	49.750.000	16,87%
51	Deputi Iii Bidang Pengawasan Pangan Olahan	9.762.191.500	952.070.000	9,75%
52	Deputi Iv Bidang Penindakan	9.306.665.000	798.913.478	8,58%
53	Balai Pom Di Mamuju	6.125.552.000	479.053.775	7,82%
54	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat Dan Makanan	6.836.889.000	345.300.006	5,05%
55	Deputi Ii Bidang Pengawasan Obat Tradisional Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik	9.170.208.000	177.430.000	1,93%
56	Loka Pom Di Kabupaten Mimika	212.400.000	-	0,00%
57	Loka Pom Di Kota Baubau	86.000.000	-	0,00%
58	Loka Pom Di Kota Dumai	437.030.000	-	0,00%
Jumlah		556.335.838.588	397.407.664.530	71,43%



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. 4244691, 42883279, Fax. : 4263333. E-mail : halobpom@pom.go.id, Website : www.pom.go.id



BADAN POM

KINERJA BPOM

DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2021



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI